



LAPORAN

KINERJA
PELAKSANAAN
PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH
LUAR NEGERI
TRIWULAN II 2017





REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN II TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR



Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan pemantauan dan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri lainnya, beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) juga disampaikan dalam laporan ini.

Pada periode Triwulan II Tahun 2017, persentase penyerapan mencapai 22,5 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 33,3 persen, dan bahkan lebih rendah dari rata-rata penyerapan lima tahun terakhir pada triwulan kedua, yaitu sebesar 26,2 persen. Menurunnya kinerja penyerapan tersebut, antara lain disebabkan penurunan persentase penyerapan yang cukup signifikan pada beberapa instansi, antara lain pada BPKP, Kemedes PDDT, Kementan, Kemenhan, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT, Pertamina. Berdasarkan kinerja dari masing-masing proyek, dalam Triwulan II Tahun 2017, terdapat 31 proyek yang memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap di atas 35,0 persen dari target penarikan pinjaman. Beberapa kendala yang masih menjadi penyebab rendahnya kinerja proyek, antara lain permasalahan pembebasan lahan, pengadaan barang/jasa, dan kinerja kontraktor yang buruk.

Pembelajaran (*lesson learned*) pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang dicantumkan dalam laporan ini, antara lain dari proyek *Toll Road Development of Solo – Kertosono Phase I* pada Kemen PUPR yang memberikan pembelajaran tentang pentingnya pengaturan kesepakatan dalam proyek yang merupakan "*Joint Operation*" terutama terkait aturan pembayaran atau transfer dana termin dari rekening kontraktor induk yang umumnya merupakan kontraktor asing ke rekening kontraktor lokal. Pada *Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II* di Kemen PUPR, didapatkan pembelajaran mengenai pentingnya kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga fungsi sarana prasarana pengendalian ancaman banjir lahar. Selain itu diperlukan juga upaya untuk mencegah kerusakan infrastruktur yang sudah terbangun dengan melakukan pembatasan akses masyarakat terhadap lokasi proyek, dan regulasi yang ketat untuk mengatur kegiatan penambangan pasir.

Untuk memastikan manfaat proyek serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya. Sedangkan cara terbaik (*best practice*) yang didapatkan dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

DAFTAR ISTILAH

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AFD	: <i>Agence Francaise de Development</i>
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Batam	: Badan Pengusahaan Batam
BPS	: Badan Pusat Statistik
EU	: <i>European Union</i>
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
JBIC	: <i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemen KP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemennaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemen PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemen PPN/Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
KSA	: Kreditor Swasta Asing
LIPi	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPKE	: Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i> ; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah
PT. PII	: PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT. Pertamina	: PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PT.PLN	: PT. Perusahaan Listrik Negara
PT. SMI	: PT. Sarana Multi Infrastruktur

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Pada akhir Triwulan II Tahun 2017 (posisi 30 Juni 2017), nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) adalah sebesar ekuivalen USD USD 16.089,8 juta, yang terdiri dari 157 proyek dan dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami penurunan sebesar USD 209,5 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penurunan ini disebabkan karena adanya beberapa proyek yang sudah selesai, Sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar USD 7.636,8 juta atau mencapai 47,5 persen dari total nilai pinjaman yang sedang berjalan. Apabila dilihat dari kinerja penyerapan, realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 adalah sebesar USD 612,9 juta atau mencapai 22,5 persen dari target Tahun Anggaran 2017 sebesar USD 2.720,9 juta. Persentase penyerapan ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penyerapan pada triwulan kedua dalam lima tahun terakhir, yaitu 26,2 persen. Kemajuan kinerja penyerapan proyek selama satu triwulan ini berjalan dengan cukup baik, yang diindikasikan dengan adanya sekitar 31 proyek yang mampu menyerap anggaran lebih dari 35,0 persen dari target penyerapan di tahun 2017. Namun demikian, masih terdapat cukup banyak proyek yang sangat rendah penyerapannya atau bahkan belum mengalami penyerapan (*penyerapan nol*).

Rendahnya kinerja beberapa proyek disebabkan oleh sejumlah permasalahan, diantaranya rendahnya kinerja kontraktor, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Dalam laporan ini juga disampaikan pembelajaran (*lesson learned*) dari proyek yang masih berjalan dan proyek yang sudah selesai, serta uraian kinerja pelaksanaan dari beberapa proyek hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan.

PINJAMAN LUAR NEGERI

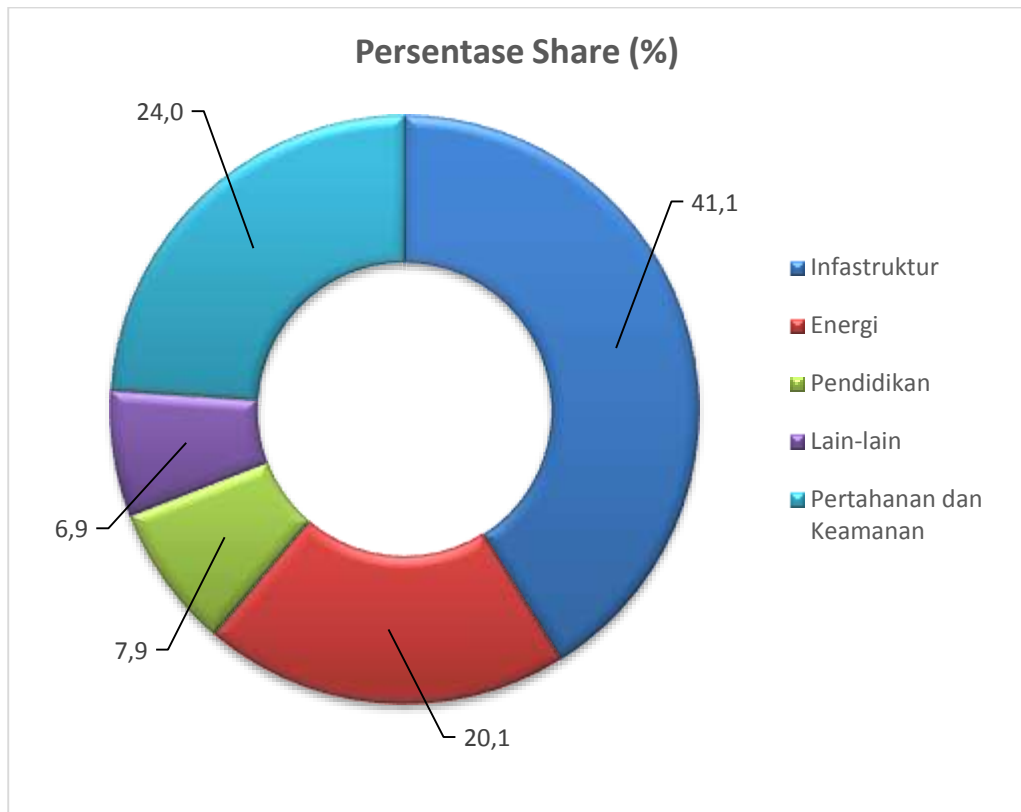
1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN II TAHUN 2017

Profil pinjaman luar negeri dapat dilihat berdasarkan pengelompokan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan II Tahun 2017, serta perubahannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2016.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2017 (diolah)

Sebagian besar pinjaman luar negeri dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sekitar 61,2 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan II Tahun 2016), terdapat penurunan komposisi pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan, yaitu dari 28,4 persen menjadi 24,0 persen. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor energi, yaitu dari 25,0 persen turun menjadi 20,1 persen. Selain itu, dalam periode yang sama, komposisi pinjaman di sektor pendidikan mengalami sedikit peningkatan dari 7,3 persen menjadi 7,9 persen. Peningkatan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor infrastruktur yang mengalami kenaikan signifikan dari 32,5 persen menjadi 41,1 persen. Sedangkan pada sektor lain-lain tidak terjadi perubahan komposisi pinjaman, yaitu sebesar 6,9 persen. Perubahan komposisi pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang baru efektif dan adanya proyek-proyek yang sudah selesai (closed).

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

(Ekuivalen Juta USD)

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Infrastruktur	46	6.608,3	2.782,7	42,1	3.825,6	1.053,6	226,5	21,5
Energi	19	3.239,8	935,1	28,9	2.304,7	405,4	141,6	34,9
Pendidikan	14	1.271,3	488,1	38,4	783,2	192,0	37,1	19,3
Lain-lain	14	1.115,7	697,0	62,5	418,6	171,5	32,5	19,0
Pertahanan dan Keamanan	64	3.854,7	2.733,8	70,9	1.120,9	898,3	175,2	19,5
Total	157	16.089,8	7.636,8	47,5	8.453,0	2.720,9	612,9	22,5

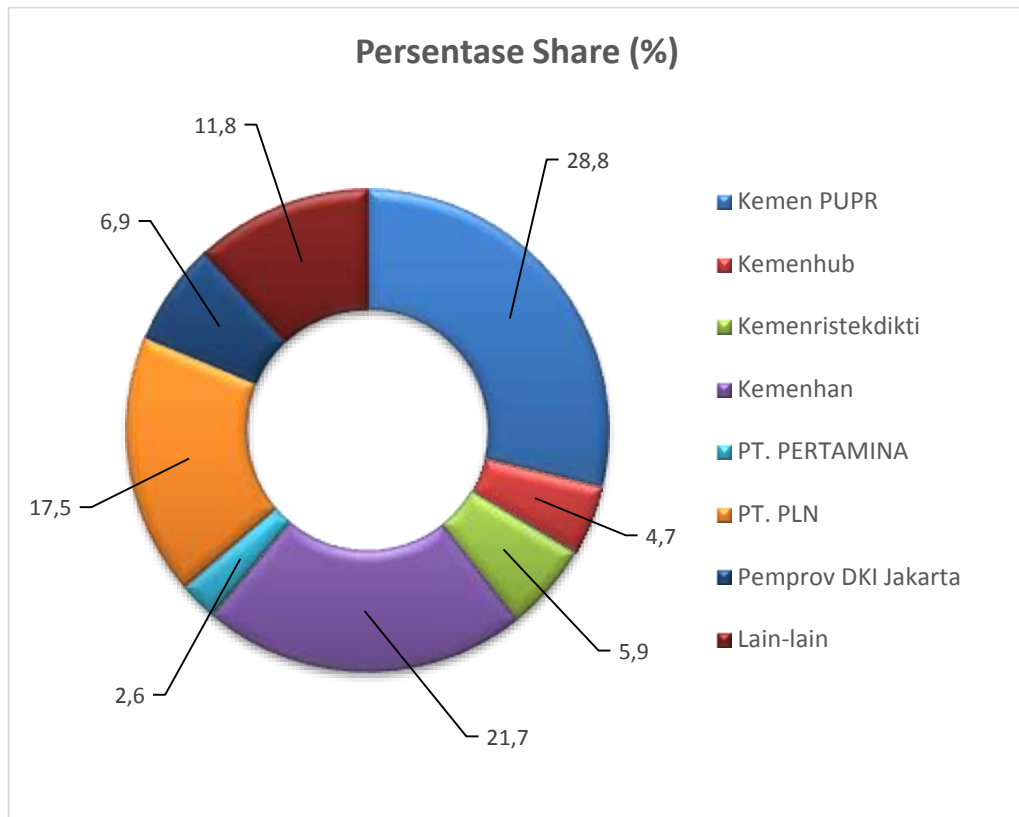
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2017 (diolah)

Secara umum realisasi penyerapan pada triwulan ini menunjukkan penurunan dibanding periode yang sama pada tahun 2016, yaitu turun dari 33,3 persen menjadi 22,5 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, sektor energi memiliki kinerja penyerapan yang cukup tinggi, yaitu mampu menyerap 34,9 persen dari target penyerapan di tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 19,4 persen. Disamping itu, kinerja di sektor infrastruktur juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 19,1 persen pada Triwulan II Tahun 2016, menjadi 21,5 persen pada triwulan ini. Sebaliknya, kinerja penyerapan di sektor pertahanan dan keamanan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 62,4 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi hanya 19,5 persen pada triwulan ini. Demikian pula sektor lain-lain, mengalami penurunan kinerja penyerapan dari 26,5 persen pada Triwulan II Tahun 2016 menjadi hanya 17,8 persen pada triwulan ini. Penurunan kinerja penyerapan juga terjadi pada sektor pendidikan dari 23,9 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi hanya 19,3 persen pada triwulan ini.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Dalam gambar 2.2. dapat dilihat komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggungjawab. Proporsi terbesar berada di Kemenhan, Kemen PUPR dan PT PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kemen PUPR dari 28,2 persen pada triwulan lalu menjadi 28,8 persen pada triwulan ini. Peningkatan komposisi pinjaman juga terjadi pada Kemenhan, yaitu dari 19,9 persen pada triwulan lalu menjadi 21,7 persen pada triwulan ini. Peningkatan komposisi pinjaman juga terjadi pada Kemenhub, Kemenristekdikti, PT. Pertamina, dan Pemprop DKI Jakarta. Sedangkan komposisi pinjaman pada PT. PLN mengalami penurunan dari 20,8 persen menjadi 17,5 persen pada periode yang sama.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2, maka apabila dilihat dari nilai pinjaman, terdapat penurunan nilai pinjaman yang cukup signifikan dari Triwulan II Tahun 2016 ke Triwulan II Tahun 2017, yaitu turun sebesar USD 209,5 juta. Perubahan nilai pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada Pemprop DKI Jakarta yang naik sebesar USD 642,8 juta, Kemen PUPR juga mengalami kenaikan sebesar USD 562,4 juta, dan Kemenhub juga naik sebesar USD 110,7 juta. Sedangkan Kemenhan mengalami penurunan sebesar USD 789,2 juta. Demikian juga PT. PLN yang mengalami penurunan sebesar USD 684,9 juta, dan PT. Pertamina yang mengalami penurunan sebesar USD 144,5 juta. Perubahan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*), dan adanya proyek-proyek yang baru efektif. Dalam tahun 2017 sampai dengan triwulan II, di Kemen PUPR terdapat 1 proyek yang selesai, dan 6 proyek yang baru efektif. Sementara itu di Kemenhub terdapat 1 proyek yang selesai dan 1 proyek yang baru efektif.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

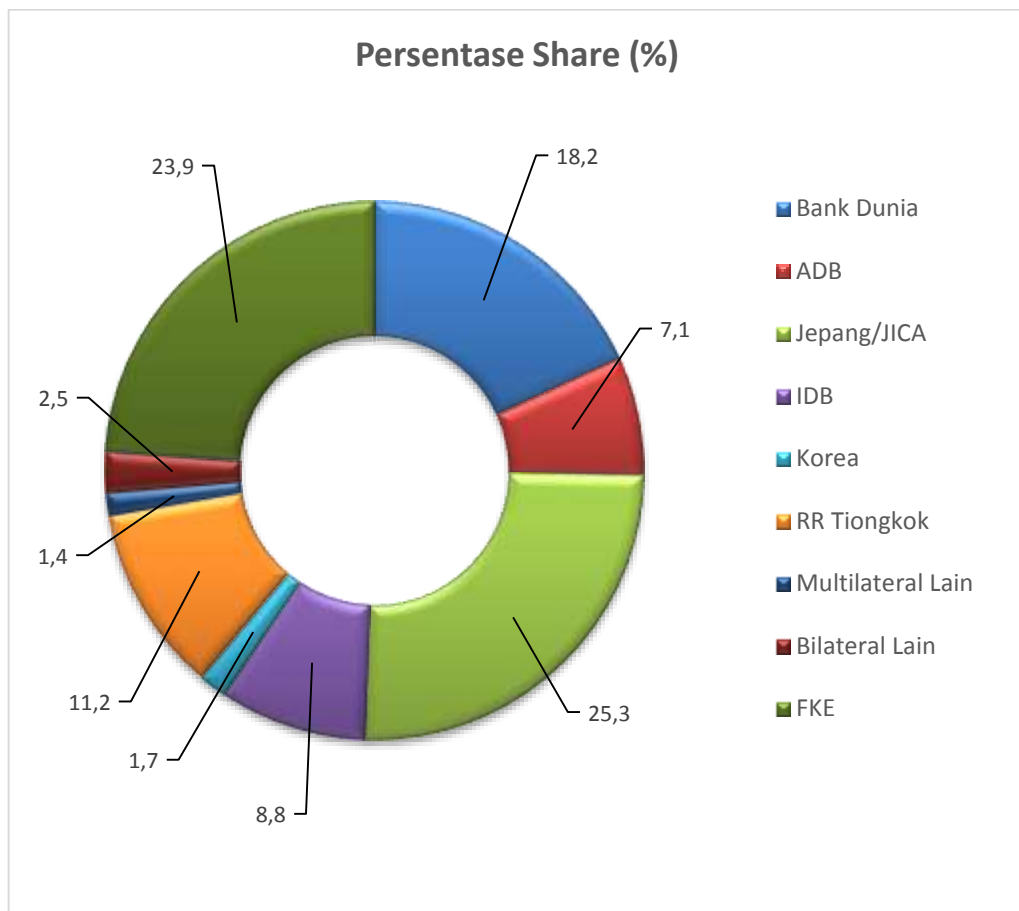
Pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok sumber pinjaman, yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan *Saudi Fund*.

Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Australia, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2017 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund
 - Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Jerman, Perancis, dan Spanyol

Sekitar hampir 70 persen dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari LPKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3, Sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan II Tahun 2016), terdapat perubahan yaitu menurunnya komposisi pinjaman Bank Dunia dari 20,7 persen pada Triwulan II Tahun 2016 menjadi 18,2 persen pada Triwulan II Tahun 2017. Penurunan komposisi juga terjadi pada porsi pinjaman Jepang yang turun dari 26,7 persen menjadi 25,3 persen, dan porsi pinjaman LPKE yang turun dari 28,3 persen menjadi 23,9 persen. Sebaliknya, pada rentang periode yang sama, terjadi kenaikan porsi pinjaman IDB dari 5,9 persen menjadi 8,8 persen, dan pinjaman ADB dari 5,7 persen menjadi 7,1 persen. Kenaikan porsi pinjaman juga terjadi untuk pinjaman RR Tiongkok dari 7,0 persen menjadi 11,2 persen. Untuk komposisi pada pemberi pinjaman lain tidak mengalami banyak perubahan.

Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2017, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 16.089,8 juta mengalami penurunan sebesar USD 324,5 juta dari triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang selesai (*closed*), sehingga beberapa pemberi pinjaman mengalami penurunan nilai pinjaman. Bank Dunia mengalami penurunan nilai pinjaman yang paling signifikan, yaitu sebesar USD 596,0 juta. Namun, terdapat juga peningkatan nilai pinjaman, yaitu KSA/LPKE sebesar USD 224,9 juta, dan Jepang sebesar USD 39,9 juta.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Loan	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
						Target	Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	57	5.705,8	2.397,3	3.308,5	735,8	182,6	24,8
	Bank Dunia	19	2.926,2	1.582,5	1.343,7	261,5	65,4	25,0
	ADB	13	1.143,1	287,7	855,4	194,1	35,5	18,3
	IDB	20	1.414,3	383,4	1.030,9	239,8	78,0	32,5
	IFAD	3	151,2	118,4	32,8	24,8	1,2	4,9
	Saudi Fund	2	71,0	25,2	45,8	15,5	2,5	16,1
II	Kreditor Bilateral	53	6.545,0	2.516,1	4.028,9	1.072,2	257,5	24,0
	Jepang	29	4.072,5	1.725,1	2.347,4	640,5	98,1	15,3
	Jerman	2	105,0	23,5	81,5	15,3	1,4	9,4
	Korea	5	273,5	82,8	190,8	63,5	19,4	30,5
	Perancis+AFD	5	274,1	118,9	155,3	20,4	2,5	12,1
	RR Tiongkok	11	1.803,4	549,6	1.253,7	328,2	132,4	40,3
	Spanyol	1	16,4	16,2	0,2	4,3	3,7	85,3
III	KSA/LPKE	65	3.839,0	2.723,4	1.115,6	912,9	172,9	18,9
	TOTAL	175	16.089,8	7.636,8	8.453,0	2.720,9	612,9	22,5

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2017 (diolah)

Realisasi penyerapan pada Triwulan II Tahun 2017 yang mencapai 22,5 persen tersebut sebagian besar disumbang oleh kinerja proyek LPKE/KSA sebesar 18,9 persen, Kreditor Bilateral sebesar 24,0 persen dan Kreditor Multilateral sebesar 24,8 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral dicapai oleh proyek-proyek pinjaman IDB dan Bank Dunia, yang masing-masing mencapai 32,5 persen dan 25,0 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terjadi pada proyek-proyek pinjaman Spanyol dan RR Tiongkok, yaitu mencapai 85,3 persen dan 40,3 persen.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN II TAHUN 2017

Pada tabel 2.4 berikut ini dapat dilihat beberapa proyek yang baru efektif dan masuk kedalam pemantauan triwulanan. Sedangkan pada tabel 2.5 dapat dilihat beberapa proyek yang telah selesai (*closed*) dalam satu triwulan ini sehingga dikeluarkan dari pemantauan pada Triwulan II Tahun 2017.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Baru Efektif di Triwulan II Tahun 2017

(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Baru Efektif				
1	1 Kegiatan	Kemenhan		224,9
TOTAL				224,9

Tabel 2.5 Rekapitulasi Proyek Tutup di Triwulan III Tahun 2017

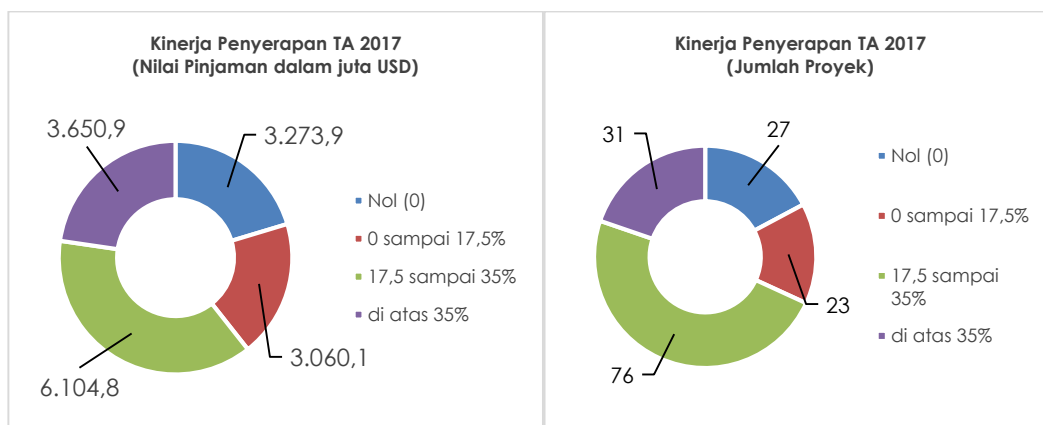
(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Berakhir Masa Berlakunya				
1	<i>Additional Loan for Jatigede Dam</i>	Kemen PUPR	RR Tiongkok	117,0
2	<i>Sustainable Economic Development Through Technical and Vocational Education and Training</i>	Kemendikbud	Jerman	21,2
3	<i>Infrastructure Development Space Oceanography (INDESCO)</i>	Kemen KP	AFD	30,0
4	<i>Animal Husbandry Technology and Practises Improvement to Accelerate Meat and Milk Production</i>	LIPI	Spanyol	16,4
5	<i>North-West Sumatera Inter-Connector Transmission</i>	PT. PLN	JICA	145,2
TOTAL				329,8

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2017

Berdasarkan target penyerapan tahun 2017, maka realisasi anggaran sampai dengan triwulan ini mencapai 22,5 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami penurunan sebesar 10,9 persen. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh adanya penurunan yang signifikan untuk realisasi penyerapan pada proyek-proyek LPKE/KSA. Penurunan realisasi penyerapan juga terjadi pada proyek-proyek Kreditor Multilateral, sedangkan realisasi penyerapan untuk proyek-proyek *soft loan* dari Kreditor Bilateral cenderung mengalami peningkatan. Meskipun demikian, capaian kinerja setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, bahkan mencapai diatas persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat pula beberapa proyek yang belum melakukan penyerapan atau bahkan tidak mengalami pergerakan sejak mulai efektif sampai dengan Triwulan II Tahun 2017.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan TA 2017 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2017 (diolah)

Bila dilihat dari kinerja penyerapan, secara umum terdapat sekitar 31 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 35,0 persen dari target penyerapan tahun 2017. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 31 proyek tersebut bernilai USD 3.650,9 juta atau 22,7 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 16.089,8 juta. Sekitar 50 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 17,5 persen terhadap target tahun 2017. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum menunjukkan adanya penyerapan sejak proyek dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap proyek-proyek tersebut karena nilainya mencapai USD 6.334,0 juta atau 39,4 persen dari total nilai pinjaman. Untuk meningkatkan kinerja proyek-proyek yang tergolong rendah penyerapannya tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan permasalahan proyek, dan mempercepat proses reviu terhadap perubahan atau revisi rencana pelaksanaan proyek.

Beberapa permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan proyek dalam triwulan ini. Permasalahan pertama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan pada ruang lingkup, nilai, dan lokasi proyek. Permasalahan kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya reviu dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu permukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan *Withdrawal Application* (WA) dan pengesahan (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan/SP3) juga masih sering terjadi. Permasalahan lainnya yang saat ini mulai sering dilaporkan adalah rendahnya kinerja kontraktor yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek, disamping masalah terkait lainnya seperti kekurangan tenaga kerja, material dan peralatan berat.

3. LESSON LEARNED PELAKSANAAN PROYEK

Pada Triwulan II Tahun 2017 ini terdapat beberapa proyek yang bisa dijadikan pembelajaran. Dalam laporan ini, dipaparkan 2 (dua) contoh proyek. Proyek tersebut adalah proyek yang sedang berjalan, yaitu *Toll Road Development of Solo-Kertosono Project Phase I* dan *Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II*. Kedua proyek tersebut dikelola oleh Kemen PUPR.

Toll Road Development of Solo-Kertosono Project Phase I

Proyek *Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I* merupakan proyek pinjaman luar negeri yang dibiayai oleh RR Tiongkok. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan, serta mendukung program pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan nasional. Adapun sasaran yang diharapkan tercapai melalui proyek ini adalah meningkatnya layanan lalu lintas di masa yang akan datang, dan mendukung pertumbuhan serta penyebaran perekonomian.

**Tabel 2.6 Data Umum Proyek Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I
(Loan China Exim Bank PBC No. (2015) 39 Total No. (382))**

Nama Proyek	Toll Road Development of Solo-Kertosono Project Phase I (Loan China Exim Bank PBC No. (2015) 39 Total No. (382))
Ruang Lingkup Proyek	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo-Kertosono
Instansi Pelaksana	Dirjen Bina Marga Kemen PUPR
Kontraktor	a) China Road and Bridge Corporation; b) PT. Wijaya Karya (Tbk); c) PT. Pembangunan Perumahan (Tbk).
Nilai Pinjaman	USD 198.772.235
Ruang Lingkup Pekerjaan	a) Pembangunan jalan utama ruas Saradan-Kertosono sepanjang 38,39 km; b) Pembangunan 23 jembatan di 15 lokasi dengan panjang total 659 m; c) Pembangunan jalan akses sepanjang 1,32 km; d) Pembangunan 9 overpass dan 29 underpass; e) Pembangunan 1 interchange; f) Pembangunan 1 pedestrian bridge.
Lokasi	Saradan – Kertosono Jawa Timur
Masa Berlaku	30 September 2016 – 30 September 2021

Beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan proyek ini, antara lain:

- 1) Pembebasan lahan.
 - Terdapat 217 bidang tanah yang belum bisa dilaksanakan konstruksinya, dengan perincian: 190 bidang dalam proses eksekusi, 26 bidang dalam proses kasasi di MA, dan 1 bidang merupakan tanah wakaf.
 - Total seluruh bidang tanah yang belum bebas di Kabupaten Nganjuk sebanyak 166 bidang sudah dikonsinyasi, saat ini sedang dalam proses pengajuan eksekusi.
- 2) Teknis.
 - Review design akibat perbaikan tanah lunak (*soft soil*) dan muka air yang tinggi, rekomendasi teknis BBWS, permintaan warga (*overpass* menjadi *underpass*), dan beberapa kondisi lapangan lainnya menyebabkan kebutuhan tambahan dana lebih dari 10%. Proses justifikasi saat ini masih berada di tingkat Balai, dan akan dilanjutkan ke tingkat pusat.
 - Realokasi utilitas jaringan listrik PLN tegangan tinggi (SUTET) pada dua titik terkendala karena PT. PLN menyerahkan seluruh prosesnya kepada PPK fisik. Namun, mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan proyek, dan realokasi belum mendesak untuk segera dilakukan, maka satker telah bersurat kepada Balai agar penanganan realokasi dilimpahkan kepada operator jalan tol.
- 3) Administrasi.
 - Sampai saat ini, CEXIM Bank tidak mengizinkan proses transfer dari rekening CRBC di Cina ke rekening JO (rekening kontraktor lokal) di Indonesia. Sehingga dana termin yang ditransfer sementara masih menggunakan dana talangan dari kontraktor CRBC di Indonesia.
 - Pihak kontraktor lokal juga kesulitan mendapatkan informasi mengenai perincian transfer secara tertulis (hanya lisan).

Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek *Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I* adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antar pihak terkait masalah pembebasan lahan, teknis, dan administrasi. Pelaksana proyek perlu meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan para pihak yang terkait dengan proses pembebasan lahan dan administrasi agar pelaksanaan proyek dapat dipercepat, terutama dalam penyelesaian proses konsinyasi, eksekusi, dan kasasi pembebasan lahan, serta

penyelesaian pembayaran kepada kontraktor lokal (PT. Wijaya Karya (Tbk) dan PT. Pembangunan Perumahan (Tbk)).

2. Kesepakatan dalam proyek yang merupakan "Joint Operation" perlu diatur secara cermat terutama terkait aturan pembayaran atau transfer dana termin dari rekening kontraktor induk yang umumnya merupakan kontraktor asing ke rekening kontraktor lokal. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga *cash flow* kontraktor lokal dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Gambar 2.5. Dokumentasi Kunjungan ke Lokasi Proyek Toll Road Development of Solo-Kertosono



Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II

Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II merupakan proyek pinjaman luar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah Jepang. Proyek ini bertujuan untuk mengamankan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dari ancaman banjir lahar akibat erupsi gunung Merapi dengan membangun beberapa prasarana pengendali lahar. Adapun sasaran yang diharapkan tercapai melalui proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya rencana induk yang baru dengan melakukan kaji ulang rencana induk pengendalian lahar yang sudah ada, karena telah terjadi erupsi dahsyat pada tahun 2010 (erupsi Kaliurang 100 tahunan).
2. Terbangunnya saluran pengelak banjir Kali Putih untuk mengamankan Jalan Nasional Yogyakarta-Magelang dan daerah bagian hilir Kali Putih dari ancaman banjir lahar akibat erupsi dahsyat Gunung Merapi tahun 2006 yang sewaktu-waktu terjadi selama musim hujan.
3. Terbangunnya kantong penampung materi lahar Kali Gendol karena sebagian besar material letusan erupsi dahsyat Gunung Merapi tahun 2010 mengendap di daerah Kali Gendol bagian hulu dan sewaktu-waktu mengalir sebagai lahar selama musim hujan.
4. Tersosialisasikannya fungsi dan pemanfaatan prasarana pengendali lahar.

Tabel 2.7. Data Umum Proyek Urgent Disaster Reduction for Mount Merapi and Lower Progo River Area (Loan JICA IP 566)

Nama Proyek	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area II (Loan JICA IP 566)
Ruang Lingkup Proyek	Pembangunan sarana prasarana pengendalian ancaman banjir lahar akibat erupsi Gunung Merapi, terdiri dari dua paket: a) Paket I adalah pembangunan saluran pengelak banjir lahar Kali Putih; b) Paket II adalah pembangunan kantong lahar Kali Gendol.
Instansi Pelaksana	Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR (BBWS Serayu-Opak)
Konsultan	Yachiyo Engineering Co.Ltd & Associates
Kontraktor	a) Paket I: PT. Wijaya Karya (JO) – PT. Brantas Abipraya (Persero); b) Paket II: PT. Adhi Karya (JO) – PT. Hutama Karya.
Nilai Pinjaman	JPY 511.000.000

Ruang Lingkup Pekerjaan	<p>a) Pembangunan saluran pengelak banjir lahar Kali Putih meliputi pekerjaan <i>channel, ground sill, consolidation dam, diversion, revetment, bed protection</i>;</p> <p>b) Pembangunan kantong lahar Kali Gendol meliputi pekerjaan konstruksi dam setinggi 14 m yang tersebar di 14 lokasi, dan konstruksi tanggul setinggi 8 m sepanjang 2.000 m.</p>
Lokasi	<p>a) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul);</p> <p>b) Provinsi Jawa Tengah (Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten).</p>
Masa Berlaku	23 Juni 2014 – 23 Juni 2021

Beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan proyek ini, antara lain:

1. Akses terbuka oleh masyarakat sekitar.
Lokasi proyek yang berada di sekitar pemukiman penduduk menyebabkan lokasi proyek menjadi daerah terbuka bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat bebas untuk melakukan aktifitas di lokasi proyek. Selain menjadi tempat bermain bagi anak-anak, bekas galian juga dipergunakan sebagai kolam ikan oleh masyarakat sekitar.
2. Penambangan pasir ilegal.
Penambang pasir melakukan penambangan ilegal menggunakan alat-alat manual yang dapat mencelakakan penambang dan merusak konstruksi dasar maupun dinding di sepanjang Kali Putih dan Kali Gendol.
3. Terbentuknya aliran erupsi baru.
Muntahan lahar dari erupsi Gunung Merapi pada awalnya mengarah ke Selatan, namun akhir-akhir ini terbentuk aliran erupsi baru menuju ke tenggara.

Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek *Urgent Disaster Reduction for Mount Merapi and Lower Progo River Area II* adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya sarana prasarana pengendalian ancaman banjir lahar Gunung Merapi, maka diperlukan adanya kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan yang dilakukan secara rutin. Selain itu diperlukan juga upaya untuk mencegah kerusakan infrastruktur yang sudah terbangun dengan melakukan pembatasan akses masyarakat terhadap lokasi proyek, dan regulasi yang ketat untuk mengatur kegiatan penambangan pasir.
2. Mengingat kondisi geografis daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung berapi aktif, maka replikasi proyek serupa dapat dipertimbangkan untuk daerah sekitar segitiga gunung berapi aktif lainnya, yaitu Gunung Slamet, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Namun diharapkan replikasi proyek dapat diarahkan menjadi *multipurpose*, sehingga apabila tidak terjadi erupsi, infrastruktur yang terbangun tetap dapat dimanfaatkan sebagai aliran irigasi untuk lahan pertanian dan perkebunan.

Gambar 2.6. Dokumentasi Kunjungan ke Lokasi Proyek Urgent Disaster Reduction for Mount Merapi and Lower Progo River Area



HIBAH LUAR NEGERI

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan terhadap pelaksanaan hibah luar negeri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencari solusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasil pemantauan selain digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan, juga digunakan sebagai pembelajaran dalam pengambilan kebijakan maupun replikasi, serta *scaling up* kegiatan di masa mendatang.

Hibah luar negeri yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan II Tahun 2017 berjumlah 2 (dua) proyek hibah terencana, yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, terdapat 6 (enam) hibah langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga dilaporkan pelaksanaannya dalam rapat pemantauan khusus hibah Triwulan II Tahun 2017.

Japan's Grant Aid for The Forest Preservation Programme Project in the Republic of Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemerintah Jepang memberikan hibah dalam bentuk *Grant Aid for The Forest Preservation Programme* sebesar JPY 1 milyar kepada Pemerintah Indonesia melalui *Japan International Cooperation System* (JICS) sebagai *procurement agent*, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *implementing agency* sesuai *Amendment of Agent Agreement* yang telah ditandatangani pada 10 Mei 2013. Kerjasama ini pada awalnya merupakan *exchange notes* antara Dirjen Hubungan AsPac dan Afrika Kementerian Luar Negeri dengan Duta Besar Luar Biasa Jepang di Indonesia dengan *executing agency* dari Kementerian Kehutanan.

Secara umum kegiatan hibah ini bertujuan mendukung kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Adapun tujuan programnya adalah:

1. Meningkatkan kegiatan patroli dan survei lapangan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya di Indonesia.
2. Meningkatkan metode dan kegiatan restorasi.

Ruang lingkup kegiatan hibah meliputi: 1) *Equipment procurement* berupa penyediaan alat-alat survei di 43 Taman Nasional dan 27 KSDA; 2) *Facility construction* berupa pembangunan gedung *visitor center* di tiga Taman Nasional (Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, dan Taman Nasional Kelimutu); 3) *Technical assistance for afforestation* berupa kegiatan restorasi ekosistem dengan total luas 414,1 hektar di tiga Taman Nasional (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Ciremai, dan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru).

Sesuai dengan *Gift Certificate* (surat keterangan pemberi hibah) yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, total hibah yang diberikan Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia pada *Japan's Grant Aid for The Forest Preservation Programme in the Republic of Indonesia* adalah sebesar JPY 1 milyar dengan rincian pada masing-masing komponen hibah sebagai berikut:

- *Equipment procurement* JPY 39.659.600
- *Facility construction* JPY 390.766.400
- *Technical assistance for afforestation* JPY 439.195.000
- *Consultancy services* JPY 130.379.000

Realisasi penggunaan dana hibah tersebut sampai dengan bulan Juli 2017 mencapai JPY 39.659.600 atau ekuivalen dengan Rp 4.898.753.792,-.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan hibah untuk masing-masing lingkup pekerjaan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. *Equipment Procurement.*

- BAST Barang antara pihak JICS dengan Direktorat Kawasan Konservasi selaku *executing agency* telah dibuat pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor BA 6/KK/PPKK.2/KSA.1/5/2016. Total nilai hibah langsung barang tersebut adalah senilai JPY 39.659.600 atau ekuivalen dengan Rp 4.898.753.792,-.
- Pengesahan hibah peralatan survei telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan cq Ditjen DJPU melalui Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) No. SP3HLBJS.0769/PR.8/2016 tanggal 22 November 2016 senilai JPY 39.659.600 atau ekuivalen dengan Rp 4.898.753.792,-.
- Pencatatan hibah telah dilakukan oleh KPPN Jakarta dengan Nomor 2016182500668001 tanggal 16 Desember 2016 senilai JPY 39.659.600 atau ekuivalen dengan Rp 4.898.753.792,-. Saat ini sedang dilakukan rekonsiliasi simak BMN Direktorat Kawasan Konservasi dan penyiapan BAST dari Direktorat Kawasan Konservasi kepada seluruh UPT Penerima Hibah.

2. *Facility construction.*

- Lokasi pembangunan gedung *visitor center* telah dipersiapkan oleh tiga Taman Nasional yang akan menerima, yaitu:
 - Komodo *Visitor Center* di Labuan Bajo seluas 526 m².
 - Bantimurung *Visitor Center* di Bantimurung Bulusaraung *National Park* seluas 467,7 m².
 - Kelimutu *Visitor Center* di Kelimutu *National Park* seluas 526 m².
- Sampai saat ini kelanjutan kegiatan pembangunan gedung *visitor center* masih menunggu proses administrasi terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/*Value Added Tax* (VAT) yang berhubungan dengan pembelian material bangunan termasuk juga VAT konsultan dua kegiatan lainnya.
- Direktur Konservasi Kawasan telah bersurat kepada Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri untuk memroses administrasi VAT dan *refund*, serta bersurat kepada Mr. Kawakami (*project manager* JICS) untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam proses VAT dan *refund*. Saat ini Direktorat Konservasi Kawasan masih menunggu dokumen dimaksud.
- Berdasarkan hasil pertemuan dengan Ditjen DJPPR Kementerian Keuangan yang melibatkan semua pihak terkait (Ditjen Pajak, Kemenlu, Bappenas) disepakati bahwa terkait dengan masalah administrasi VAT akan dicarikan solusinya oleh Kemenkeu, sedangkan kegiatan teknis di lapangan agar tetap dilaksanakan.

3. *Technical Assistance for Afforestation.*

- Telah dilakukan program pelestarian hutan melalui Nota Pertukaran pada tanggal 18 Maret 2010 antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia, dilanjutkan dengan perjanjian agen dengan JICS, dan perjanjian jasa konsultan untuk *technical assistance* dengan Sumitomo *Forestry Co, Ltd* dan *Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center* (JIFPRO).
- Lokasi pelaksanaan *technical assistance* meliputi tiga Taman Nasional dengan total target area seluas 429,1 hektar, yaitu:
 - Taman Nasional Manupeu Tanah Daru pada empat lokasi seluas 257,6 hektar yang merupakan areal perluasan Taman Nasional eks Perum Perhutani yang didominasi oleh Pinus Merkusii. Kegiatan restorasi dilakukan pada lokasi dengan ketinggian 200-450 mdpl.
 - Taman Nasional Gunung Ciremai untuk satu lokasi seluas 60 hektar dengan ekosistem savana, dan lokasi kegiatan restorasi pada ketinggian 350-600 mdpl.
 - Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada dua lokasi seluas 111,5 hektar dengan ekosistem hujan pegunungan, dan lokasi kegiatan restorasi pada ketinggian 2.100 – 2.400 mdpl.
- Pelaksanaan kegiatan restorasi oleh Sumitomo *Forestry* telah memasuki tahun ketiga, dan kegiatan ini akan berakhir pada tahun 2020. Total luas areal penanaman yang telah dilakukan selama tahun pertama (2015) adalah 78 hektar di Taman Nasional Manupeu Tanah Daru, 44,1 hektar di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan 27,5 hektar di Taman Nasional Gunung Ciremai. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan pemetaan areal, pemilihan *field manager*, sosialisasi kegiatan restorasi kepada masyarakat sekitar, pembentukan kelompok kerja, produksi bibit jenis lokal, persiapan lahan, pembangunan sarana prasarana penunjang seperti pondok kerja, penanaman tahun kedua, dan pemeliharaan tahun pertama.

Gambar 3.1 Equipment Items Japan's Grant Aid for The Forest Preservation Programme Project



Beberapa tantangan atau permasalahan yang potensial dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan hibah adalah belum adanya solusi terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT), dan belum diketahuinya mekanisme serah terima final untuk seluruh kegiatan hibah, mengingat pada dasarnya hibah yang diberikan oleh Pemerintah Jepang adalah dalam bentuk uang.

Hibah Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatera Landscape, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan hibah UNDP senilai USD 9,45 juta ini bertujuan meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati pada lanskap-lanskap prioritas di Sumatera melalui pelaksanaan praktik-praktik manajemen terbaik di kawasan-kawasan lindung dan areal produksi yang berdekatan, dengan menggunakan pemulihan harimau (*tiger recovery*) sebagai indikator keberhasilan.

Hibah *Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatera Landscape* terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) meningkatkan efektifitas lembaga pengelola kawasan lindung; 2) pengembangan sistem koordinasi lintas sektoral; dan 3) keberlanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati. Kegiatan hibah dilakukan pada empat lokasi, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Pelaksanaan kegiatan hibah diharapkan dapat memberikan beberapa output untuk setiap komponen sebagai berikut:

- a) Output komponen satu meliputi: 1) peningkatan kapasitas institusi pengelola; 2) penurunan ancaman harimau dan satwa mangsa; 3) peningkatan upaya patroli melalui SMART-RBM, dan 4) meningkatnya efektifitas pengelolaan.
- b) Output komponen 2 meliputi: 1) kasus kejahatan TSL yang disidangkan; 2) staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta staf pemda berpartisipasi dalam proses proyek percontohan kehutanan dan keanekaragaman hayati yang inovatif; dan 3) sistem pemantauan harimau dan satwa mangsa dikembangkan dan dioperasikan; 4) lebih dari 95% laporan konflik manusia-harimau dikaji dan/atau direspon sesuai dengan protokol mitigasi KSDAE pada tahun ketiga proyek.
- c) Output komponen 3 meliputi: 1) peningkatan sebesar lebih dari 25% untuk masing-masing dari tiga skor komponen dalam *financial sustainability scorecard*; 2) dua rencana pembiayaan berkelanjutan kawasan produksi melalui mekanisme bisnis dan keanekaragaman hayati (PES, CSR, serta kompensasi keanekaragaman hayati) yang melibatkan kemitraan PPP; dan 3) peningkatan sebesar lebih dari 25 persen untuk masing-masing dari tiap skor komponen dalam *financial sustainability scorecard*.

Secara umum perkembangan pelaksanaan hibah cukup baik, bahwa capaian beberapa indikator output melebihi target yang diharapkan. Namun, ada beberapa tantangan yang potensial dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan hibah, yaitu 1) banyaknya lanskap dan mitra, baik

pemerintah maupun mitra LSM, sehingga dibutuhkan sistem komunikasi dan pelaporan yang efisien; 2) belum berjalannya *project board meeting* untuk menyepakati beberapa perubahan yang diusulkan dalam *inception workshop*; 3) tertundanya implementasi proyek dari saat penandatanganan dokumen mempersempit waktu pelaksanaan.

Gambar 3.2 Tiger Core Area dan Panduan Monitoring



Hibah *Multistakeholders Forestry Programme*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hibah yang bernilai £ 11.013.227,56 ini berasal dari UK *Climate Change Unit* atau UK *Department for International Development* (DFID). Kegiatan hibah direncanakan berjalan selama empat tahun, sejak April 2014 sampai dengan April 2018. Secara umum kegiatan hibah bertujuan memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia dalam bidang tata kelola hutan serta perdagangan produk kayu internasional dan domestik sesuai dengan aturan perundang-undangan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan konservasi hutan, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif dan berkelanjutan, yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan mendukung Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Sustainable Development Goals*).

Tiga bidang kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan hibah ini mencakup: 1) implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara menyeluruh dan efektif pada industri kehutanan; 2) pengembangan kewirausahaan pada bisnis kehutanan berbasis masyarakat; dan 3) akses komunitas terhadap sumber daya hutan melalui skema perhutanan sosial.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan hibah sampai dengan Juni 2017 menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dana hibah yang sudah terserap mencapai 83 persen dari total dana. Adapun capaian kegiatan hibah adalah sebagai berikut:

- a) Bidang 1:
 - 100 persen ekspor produk kayu dengan sertifikat SVLK senilai USD 37,79 milyar.
 - Meningkatnya jumlah perusahaan dengan sertifikat SVLK (3.117 perusahaan dan industri, 15,05 juta hektar hutan alam).
 - SVLK diakui di pasar EU (28 negara) berupa lisensi FLEGT Indonesia.
 - Peran, hak dan tanggung jawab Pemantau Independen diakui dalam Peraturan Permen LHK No. 30 Tahun 2016.
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL).
 - Tiga perguruan tinggi menawarkan kurikulum SVLK (USU, Universitas Mulawarman, dan Universitas Nusa Bangsa).
 - Desain dan evaluasi berkala SVLK terlaksana sesuai dengan perjanjian FLEGT VPA.
- b) Bidang 2:
 - Pelatihan dan pengembangan modul tentang analisa dan pengembangan pasar.
 - Pelatihan penyuluh tentang SVLK dan pengembangan rencana bisnis bagi IKM dan hutan rakyat.

- 124 bisnis berbasis komunitas menyelesaikan rencana bisnis dan 69 telah memasukkan proposal untuk pendanaan dari BLU atau Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) dan lembaga pendanaan lain.
- Peningkatan kapasitas BLU atau P2H dalam mengelola dana bergulir.
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas KPHP dalam pengembangan bisnis berbasis komunitas.
- Peningkatan kapasitas IKM dalam pemasaran tingkat internasional melalui partisipasi di pameran internasional.
- Pengembangan sistem informasi daring untuk pemasok produk kayu ilegal.

c) Bidang 3:

- Fasilitas penyelesaian RPHJP 15 KPHP.
- Peningkatan kapasitas operasional 15 KPHP (website, database, pelatihan pemetaan partisipatif, penanganan konflik).
- Fasilitas pencadangan wilayah perhutanan sosial seluas 457,964 hektar.
- Perumusan aturan mengenai perhutanan sosial di tingkat nasional dan daerah.
- Pengembangan sistem evaluasi PHPL bagi KPHP.
- Integrasi skema perhutanan sosial, pengembangan bisnis kehutanan berbasis komunitas, pendanaan oleh BLU dan pendampingan KPHP.
- Pengembangan basis data perhutanan sosial.
- Pengembangan basis data KPHP.

Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Hibah Multistakeholders Forestry Programme



Meskipun pelaksanaan kegiatan hibah dinilai cukup baik, namun masih terdapat beberapa tantangan sekaligus peluang yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih baik lagi dan terus berlanjut, yaitu:

a) Tantangan:

- Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.
- Mengelola hubungan antara pemerintah, swasta dan LSM.
- Tingkat pengetahuan publik dan pelaku usaha yang beragam tentang SVLK.
- Kapasitas kewirausahaan yang rendah pada IKM, hutan rakyat dan KPH.
- Pemenuhan persyaratan perhutanan sosial bagi komunitas dan masyarakat adat.
- Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bertentangan.
- Negosiasi dengan pihak internasional.

b) Peluang:

- Indonesia negara pertama yang mengembangkan sistem jaminan legalitas kayu di Asia.
- Ratifikasi Perjanjian Sukarela Kemitraan FLEGT antara Indonesia-Uni Eropa.
- Indonesia negara pertama yang memperoleh lisensi FLEGT
- Mandat KPHP dalam PHPL dan pengembangan bisnis kehutanan UMKM.
- BLU Pusat P2H menyediakan dana bergulir untuk UMKM di sektor hulu dan hilir.
- Pembentukan Dirjen Perhutanan Sosial dan aturan tentang Perhutanan Sosial, termasuk penetapan Hutan Adat.

Hibah *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan *Technical Assistance* dari ADB ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta pembangunan lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+. Kegiatan hibah diharapkan akan berkontribusi terhadap dampak penggunaan sumber daya hutan secara lestari di *Heart of Borneo* (HOB) Indonesia dengan memperkuat kapasitas manajemen Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam. Dampak tersebut akan diukur dengan indikator: 1) Perluasan atau pemeliharaan tutupan hutan, 2) Kapasitas penyerapan karbon, dan 3) Pengurangan emisi karbon dioksida.

Hasil yang diharapkan dari proyek hibah ini adalah peningkatan pengelolaan sumber daya alam di HOB Indonesia. Perbaikan dalam manajemen akan tercermin dari indikator: 1) Memperkuat kapasitas pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di kelompok kerja HOB nasional, provinsi, dan kabupaten, dan 2) Menyelesaikan rencana hutan lindung di dua kabupaten di dalam unit pengelolaan hutan yang mapan di HOB Indonesia (Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat dan Malinau di Provinsi Kalimantan Utara).

Kegiatan hibah dari ADB ini bernilai USD 4,5 juta dengan masa pelaksanaan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2017. *Executing agency* dari kegiatan hibah ini adalah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan *implementing agency* adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Adapun lokasi kegiatan hibah meliputi desa Nanga Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu, dan desa Punan Long Adiu Kabupaten Malinau.

Gambar 3.4 Capacity Building Proyek *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo*



Secara umum pelaksanaan kegiatan hibah masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

- a) Pelaksanaan kegiatan mundur dari target *Annual Work Plan* 2017. Kondisi ini menjadi permasalahan mengingat kontrak PMC selesai pada November 2017.
- b) Realisasi anggaran cukup rendah, sehingga diperkirakan akan ada sisa dana hibah pada akhir proyek. Kemungkinan sisa anggaran akan dipersiapkan untuk pendanaan PES dan REDD+ di dua desa target atau untuk kegiatan pengelolaan di dua Taman Nasional.

Meskipun masih terdapat permasalahan, namun kegiatan hibah tetap menunjukkan capaian selama tahun 2017, sebagai berikut:

Output	Capaian
Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rapat pembahasan PIU Kalimantan Utara di Balikpapan. 2) <i>Think thank Forum for Sustainable Forest Management and SLVK and Social Forestry</i> untuk Pemerintah Daerah di 17 kabupaten lingkup HoB. 3) Pelatihan <i>Forest Inventory and Biodiversity Management, Air Borneo Remote Sensing Technology, Payment of Ecosystem Services, GIS and Remote Sensing, Facilitation Skills and Effective Participation</i> telah diselenggarakan. 4) Mendukung persiapan <i>HoB 11th Trilateral Meeting</i> dan memfasilitasi DELRI hadir di <i>HoB technical meeting</i> di Brunei. 5) Memfasilitasi konsultasi publik rencana pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum.
Penyelenggaraan REDD+ di tingkat sub nasional (lokal)	<ol style="list-style-type: none"> 1) SK Hutan Desa Nanga Lauk <i>Village</i>. 2) Dokumen <i>Project Idea Note (PIN) Plan Vivo</i> untuk Desa Punan Adiu dan Desa Nanga Lauk (<i>management and financial plans</i>). 3) Kunjungan lapangan ke Malinau dan Kapuas Hulu untuk memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan keuangan <i>Plan Vivo</i> Desa Punan Adiu dan Desa Nanga Lauk (<i>management and financial plans</i>). 4) Pelatihan terkait <i>Plan Vivo</i> kepada <i>Plan Vivo Facilitator</i> dan <i>Liaison Officer</i>. 5) <i>Approved Approach (AA)</i> sebagai bagian dari <i>Project Document Design (PDD)</i> telah disampaikan kepada <i>Plan Vivo Foundation</i> untuk direviu.
Lokasi percontohan untuk implementasi PES dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kunjungan lapangan ke Malinau untuk membahas perubahan program pemberdayaan masyarakat (<i>livelihood program</i>) di Desa Punan Adiu. Kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi pengembangan perikanan, pengembangan tanaman hutan seperti Gaharu, Rotan, dan Meranti, dan ekosistem yang akan berpusat di Desa Sigong Kalefang. 2) Rapat pembahasan Perda Jasling di Malinau (draf 0 Naskah Akademik dan Raperda Jasa Lingkungan telah disusun).
Pengelolaan proyek berjalan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendukung pelaksanaan Hari Konservasi Alam Nasional 2017. 2) Rapat bulanan. 3) Diseminasi pelaksanaan proyek di <i>website</i> Direktorat PJLHK. 4) Diseminasi <i>Plan Vivo</i> masuk dalam agenda program IUFRO. 5) SK <i>Project Implementation Unit</i> Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Hibah Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

USAID Lestari adalah bagian dari Kemitraan Strategis Amerika Serikat-Indonesia untuk mengatasi Perubahan Iklim – membantu Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melestarikan keanekaragaman hayati di ekosistem hutan dan bakau yang kaya akan karbon dan bernilai konservasi tinggi.

Kegiatan hibah ini dimulai pada Juli 2015 dan akan berakhir pada Juli 2020. Lestari dikembangkan dari proyek USAID IFACS sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2010-2015. Lestari melanjutkan komitmen USAID dalam meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia sejak tahun 1990-an, yang menerapkan pendekatan lanskap untuk melestarikan hutan dan bakau dengan mengutamakan pembangunan rendah emisi. Pencapaian kunci Lestari meliputi enam tahapan, yaitu;

- a) Penurunan emisi sebesar 41 persen dari kegiatan pemanfaatan lahan.
- b) Perbaikan pengelolaan 8,42 hektar hutan primer dan sekunder, termasuk perlindungan spesies.
- c) Perbaikan pengelolaan enam wilayah konservasi.
- d) Sepuluh kemitraan pemerintah-swasta terwujud untuk mempromosikan pembangunan rendah emisi.
- e) Penggalangan dana dari sumber pemerintah dan swasta.
- f) Peningkatan komitmen dari pemerintah, swasta dan masyarakat.
- g) Terciptanya kebijakan yang mendukung pembangunan rendah dan pengelolaan hutan.
- h) Terdapat model pembangunan rendah emisi dan pengelolaan hutan terintegrasi ke semua pemangku kepentingan.

Wilayah kerja Lestari meliputi lima lanskap yang terletak di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua dengan total area mencapai 15,3 juta hektar. Penerapan proyek dilakukan melalui tiga tema teknis dan delapan pendekatan strategis. Pendekatan lanskap terintegrasi memastikan adanya keselarasan koordinasi antar komponen teknis. Adapun tema teknis mencakup:

- a) Tata kelola hutan dan pemanfaatan lahan dan advokasi, terdiri dari:
 - Perencanaan KPH (RPJHP).
 - Restorasi gambut berkelanjutan dan pencegahan kebakaran melalui padiatapa (FPIC).
 - KLHS untuk RPJMD baru dan revisi RTRW.
 - Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (Simtaru) untuk memperbaiki proses perijinan sumber daya alam, transparansi dan penegakan hukum.
- b) Manajemen kolaboratif untuk konservasi, terdiri dari:
 - Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.
 - Peningkatan pengelolaan hutan melalui *collaborative management*.
 - Percepatan operasionalisasi KPH.
- c) Pelibatan sektor swasta:
 - Kewirausahaan berwawasan lingkungan.
 - Mengembangkan potensi pembiayaan inovatif.

Penyelarasan kegiatan hibah Lestari dengan prioritas pemerintah pada tingkat nasional meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 41 persen pada tahun 2020, berdasarkan NDC pemerintah.
- b) Mendukung KLHK dalam meningkatkan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan yang lestari (wilayah konservasi dan KPH).
- c) Inisiatif Perhutanan Sosial.
- d) Mendukung restorasi lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
- e) Pedoman nasional RIL-C.

Adapun penyelarasan kegiatan hibah Lestari dengan prioritas pemerintah pada tingkat tapak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbaikan tata kelola lingkungan hidup di kabupaten dan provinsi kunci (KLHS untuk RDTR, RTRW, RPJMD, RPJMDes).
- b) Perbaikan proses perijinan untuk pemanfaatan lahan melalui SST/Simtaru dan Padiatapa.
- c) Manajemen kolaboratif oleh KPH/wilayah konservasi.
- d) Praktik pengelolaan terbaik dan keberlanjutan sektor swasta.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa kegiatan hibah Lestari membangun kapasitas organisasi lokal di seluruh lanskap kerja, yang bertujuan mendukung tujuan proyek sekaligus menggalang dana selain dari Pemerintah Amerika Serikat. Kegiatan hibah Lestari berfokus pada pelibatan masyarakat di tingkat tapak yang mendukung pendekatan teknis Lestari, terutama terkait manajemen kolaboratif dan perusahaan hijau. Mitra Lestari terdiri dari LSM (asosiasi dan yayasan), dan perguruan tinggi yang diseleksi melalui mekanisme yang kompetitif. Lestari telah merealisasikan 41 persen dari nilai kontrak sebesar USD 46 juta sampai dengan Juni 2017, 38 persen waktu kontrak berjalan dari Juli 2015 sampai Juli 2020.

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Hibah USAID Lestari



Hibah Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hibah *Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component* (SICCR-TAC) bertujuan memberikan kontribusi terhadap pencapaian strategi nasional pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Selain itu, kegiatan hibah SICCR-TAC juga bertujuan merancang strategi untuk menghasilkan pengalaman yang bernilai serta berbagi pelajaran dari pelaksanaan REDD+ di tingkat daerah ke tingkat nasional dan dunia internasional.

Hibah SICCR-TAC berasal dari Uni Eropa senilai EUR 6,5 juta, dan merupakan hibah jasa langsung, dengan durasi pelaksanaan dari Januari 2016 sampai dengan Januari 2019. *Executing agency* kegiatan hibah ini adalah Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, dan *implementing agency* adalah Sekjen Pengendalian Perubahan Iklim. Lokasi kegiatan hibah adalah di Jakarta dan Aceh.

Di tingkat pusat, hibah dilaksanakan oleh GIZ bersama AHT Group dan SNV dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Sedangkan Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menjadi mitra utama di tingkat lokal.

Hibah *Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component* dilaksanakan dengan konsep sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kapasitas Pemerintah Aceh dalam upayanya menuju pembangunan ekonomi rendah karbon dan rendah emisi dalam sektor pemanfaatan lahan, perubahan lahan dan kehutanan.
- b) Memperkuat kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit lokal untuk pengelolaan hutan berkelanjutan di Aceh.
- c) Mendukung pengembangan kapasitas Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d) Memperkuat kapasitas Balai PPI yang mewakili Ditjen PPI di tingkat daerah, terutama Balai PPI wilayah Sumatera.

Hibah SICCR-TAC terdiri dari tiga komponen kegiatan yang ditujukan agar Provinsi Aceh dapat berkontribusi secara efektif dan selaras terhadap strategi REDD+ nasional melalui penyelarasan strategi REDD+ provinsi dengan kerangka pembangunan yang telah ada, serta melaksanakan dan memantau keputusan penggunaan lahan secara berkelanjutan, partisipatif, transparan, rendah karbon dan ekonomis. Ketiga komponen kegiatan hibah tersebut adalah:

- a) Konsensus dan kapasitas para pemangku kepentingan meningkat. Capaian dari komponen I ini adalah sebagai berikut :
 - Penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas (*Capacity Development Needs Assessment*) untuk KPH dan Balai PPI telah dilaksanakan.

- Aktifitas penguatan kapasitas KPH yang telah dilakukan, antara lain:
 - Pelatihan re-orientasi dan integrasi PNS eks Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota menjadi KPH.
 - Pemetaan dan pelatihan pengelolaan dan penanganan konflik tenurial.
 - Pelatihan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) selama dua bulan di Pusdiklat Reskrim Bogor yang diikuti 29 personil dari 7 KPH dan 1 staf Ditjen Penegakan Hukum KLHK.
 - *Workshop* Persiapan Pengembangan Kapasitas Balai PPI diikuti 5 (lima) Balai menghasilkan *roadmap* rencana pengembangan Balai.
 - Pembuatan film tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan perubahan iklim (dalam proses tender.
- b) Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) di tingkat provinsi tertata dan informasi untuk perencanaan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau tersedia. Capaian dari komponen II ini meliputi:
- Laporan studi dan penilaian yang telah dihasilkan dan sedang dalam proses cetak, yaitu:
 - *Ecotourism*.
 - *Review and Alignment of REDD+ and LULUCF Policies in Indonesia (National Level and Aceh Province)*.
 - *Alternatives to Leuser Geothermal Development*.
 - *Value Chain Approach: Instrument for Developing Green Economy Policy and Its Implementation*.
 - *An Assessment of Village Funds: Creating Fiscal Incentive Mechanism in Aceh Province*.
 - *Aceh Renewable Energy Assessment*.
 - Pelatihan GIS untuk KPH dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh tentang pengelolaan *database* dan sumber data tata ruang.
 - KPH telah menyusun rancangan awal *roadmap* Tingkat Emisi Hutan Provinsi (FREL) setelah pelaksanaan *workshop* FREL di Aceh pada bulan Maret 2017.
 - Diskusi perumusan sistem MRV Provinsi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan Tim RPJMA.
- c) Investasi baru dan inisiatif pembangunan hijau terbentuk. Capaian dari komponen III ini terdiri dari:
- Pendampingan proses penyusunan *Green* RPJMD dengan Kabupaten Pidie.
 - *Piloting* penyusunan *Green* Perencanaan Desa di dua desa Kabupaten Pidie yang berbatasan dengan wilayah KPH, yaitu Desa Alue Lada dan Desa Peunalom II.
 - FGD penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Desa untuk Mekanisme Insentif Fiskal

Realisasi anggaran dari kegiatan hibah *Support to Indonesia's Climate Change Response Technical Assistance Component* sampai dengan dengan akhir 2017 diperkirakan mencapai EUR 1.000.000 dari total anggaran sebesar EUR 6.498.000. Adapun tantangan yang masih harus dihadapi dalam pelaksanaan hibah ini, antara lain:

- a) Di tingkat pusat, yaitu pengembangan kapasitas Balai PPI dan Karhutla, percepatan kegiatan dan realisasi anggaran, serta proporsi alokasi anggaran.
- b) Di tingkat lokal, yaitu pergantian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dan sebagian jajarannya membutuhkan koordinasi ulang antara proyek dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, kapasitas SDM KPH memerlukan re-orientasi karena merupakan limpahan personil dari Dinas Kehutanan kabupaten/kota.

Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Hibah SICCR-TAC



Hibah Forest Programme, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Forest and Climate Programme (Forclime) merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman untuk mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka implementasi REDD+ pada tingkat proyek yang nantinya mendukung kebijakan terhadap kerangka kerja REDD+ di tingkat subnasional maupun nasional. Kegiatan hibah ini terdiri dari dua modul, yaitu *Forclime Financial Cooperation* dan *Forclime Technical Cooperation*.

Forclime Financial Cooperation merupakan hibah terencana senilai EUR 22 juta (termasuk 10 persen kontribusi dari Pemerintah Indonesia) yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), dan Malinau (Kalimantan Tenggara). Tujuan dan capaian *Forclime Financial Cooperation* adalah sebagai berikut:

- a) Penurunan emisi karbon sebesar 300.000 – 400.000 Ton CO₂ eq per lokasi *Demonstration Activities*:
 - Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL): FREL kabupaten 3,42 Mt CO₂e per tahun, REL DA REDD+ 0,11 Mt CO₂ per tahun, RL DA REDD+ 0,10 Mt CO₂ per tahun. Capaian pengurangan emisi 130.000 CO₂ net gain karbon (2015-2016).
 - Pemetaan partisipatif batas administrasi 44 desa. Batas desa yang sudah ditandatangani Bupati sebanyak 9 desa.
 - Perencanaan guna lahan partisipatif 23 desa.
 - Inventarisasi lokasi investasi 36 desa.
 - Persemaian di 54 desa, produksi 2.199.595 bibit dan penanaman 1.157.983 batang (luas penanaman 3.729,7 hektar yang melibatkan 5.095 KK).
 - Patroli perlindungan dan pengamanan hutan berbasis masyarakat di 47 desa dengan cakupan area per desa minimal 8.000 hektar.
 - Monitoring keanekaragaman hayati di 41 desa.
 - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 41 desa.
 - Pembangunan demplot *silvofishery* sebanyak 1 unit.
 - Pembangunan demplot tanaman hortikultura sebanyak 3 unit.
 - Pembangunan demplot tanaman cabai dan buah masing-masing sebanyak 2 unit.
- b) Memperkuat pengelolaan hutan secara lestari, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui perhutanan sosial yang meliputi hutan desa 8 unit, hutan adat dan hutan kemasyarakatan, serta dukungan terhadap PHPL melalui RIL dan HCVF.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui pengembangan fasilitator di tiga kabupaten (67 desa) sebanyak 310 orang, dan penyaluran dana ke masyarakat.

Forclime Technical Cooperation merupakan hibah langsung berupa bantuan teknis dari *German Ministry for Economic Cooperation and Development* senilai lebih dari EUR 35 juta sejak tahun 2009, dan baru akan berakhir pada tahun 2020. Hibah ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokasi di Jakarta, Kapuas Hulu (Kalimantan Timur), Berau (Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Tenggara), dan Sigi (Sulawesi Tenggara). Tujuan dari *Forclime Financial Cooperation* adalah menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan, mengkonservasi keanekaragaman hayati, dan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dilaksanakan

melalui tiga area strategis, yaitu kerangka kebijakan nasional dan daerah, pembangunan KPH, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Sinergi atau *linkage* antara *Forclime Financial Cooperation* dan *Forclime Technical Cooperation* dapat diuraikan sebagai berikut:

<i>Forclime Financial Cooperation</i>		<i>Forclime Technical Cooperation</i>
Pengembangan <i>Demonstration Activities</i> (DA) di tiga kabupaten untuk modal penurunan emisi Gas Rumah Kaca	↔	Output/pembelajaran model DA <i>Forclime Financial Cooperation</i> sebagai salah satu referensi (<i>baseline</i>) dalam pengembangan/penyusunan perda tentang Penurunan Emisi (REL tingkat kabupaten/provinsi)
PLUP sebagai referensi dalam penyusunan tata batas desa (output berupa SK Bupati tentang Tata Batas Desa untuk mencegah terjadinya konflik antar desa)	↔	Program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan resolusi konflik (silabus pelatihan resolusi konflik)
Pengembangan komoditas HHBK dan jasa lingkungan (madu/rotan/wisata) di beberapa desa areal <i>Forclime Financial Cooperation</i> di dalam wilayah KPH	↔	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat (LPHD) untuk teknik budidaya HHBK (madu, rotan, pengembangan desa wisata) di dalam areal KPH

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Hibah *Forest Programme*



Hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC)* yang disebut hibah *compact* adalah salah satu pilar utama kemitraan komprehensif Amerika Serikat-Indonesia. Program *compact* ini bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diselenggarakan selama 5 tahun, yaitu dari 2 April 2013 sampai dengan 1 April 2018 dengan nilai hibah sebesar USD 600 juta. Instansi pelaksana hibah ini meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, serta UKPP.

Berbeda dengan pemberi hibah pada umumnya, MCC memberikan keleluasan dan wewenang bagi Indonesia untuk mengembangkan program yang digagas dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pelibatan banyak pemangku kepentingan ini, baik dari Kementerian/Lembaga, akademisi, dunia usaha hingga organisasi masyarakat madani (*Civil Society Organization/CSO*) merupakan hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam perancangan program hibah dari mitra asing. Dengan demikian, program hibah bersaing dari MCC ini sejalan dengan prinsip *Jakarta Commitment*, yaitu Indonesia dan para mitra pembangunan bersama-sama memperkuat kepemilikan (*ownership*) negara penerima bantuan pembangunan.

Dana dalam hibah MCC ini digunakan untuk membiayai 3 (tiga) proyek atau ruang lingkup kegiatan, yaitu:

- 1) Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*) yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca melalui pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan praktek pengelolaan lahan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a) Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif.
 - b) Bantuan Teknis dan Pengawasan.
 - c) Pengetahuan Hijau.
 - d) Fasilitas hibah kemakmuran hijau.
- 2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mendukung sasaran strategis nasional menurunkan angka *stunting* (pertumbuhan terhambat) menjadi 20 persen pada 2019 dengan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, pendek, dan kekurangan gizi. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a) Pemberdayaan masyarakat.
 - b) Sanitasi.
 - c) Peningkatan peran swasta.
 - d) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan.
 - e) Penyediaan bahan pendukung.
 - f) Kampanye perubahan perilaku hidup sehat.
- 3) Modernisasi Pengadaan bertujuan untuk mendukung peningkatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbaikan kinerja pelaksanaan kontrak. Komponen kegiatannya meliputi:
 - a) Profesionalisasi pengadaan:
 - Penguatan kelembagaan ULP.
 - Pengelola pengadaan profesional.
 - Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS).
 - Percontohan Kontrak Katalog.
 - b) Pengembangan kebijakan yang progresif:
 - Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 - Pengadaan publik berkelanjutan.

Secara umum kegiatan hibah MCC yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sudah berjalan cukup baik, namun secara kumulatif penyerapan hibah ini masih relatif rendah. Berdasarkan capaian kinerja Satker Pengelola Hibah MCC, maka beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti adalah:

- 1) Pencatatan nilai realisasi hibah MCC dalam bentuk SPHL.
- 2) Pemberian fasilitas penggantian pajak (PPH dan PPN) seperti yang dipersyaratkan dalam PMK 124/2012.
- 3) Berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program MCA-I dalam percepatan proses pengelolaan aset, dan persiapan menuju *Compact End Date* (CED), serta *closing date*.
- 4) Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Program Compact*.

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Hibah Millenium Challenge Corporation



Selain beberapa hibah tersebut diatas, dalam triwulan ini juga disampaikan laporan proyek-proyek hibah lainnya, meskipun pelaporannya belum menyertakan uraian tentang capaian kinerja dari masing-masing proyek. Hibah luar negeri lainnya yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan II

Tahun 2017 berjumlah 103 proyek, yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 9.764,3 juta. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, mitigasi bencana, dan juga peningkatan kapasitas (*capacity building*).

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu hibah terencana, hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan hibah langsung dalam bentuk uang.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Bentuk dan Jenis)

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
HIBAH TERENCANA					
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
1	71174001	ADB	<i>Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBC)</i>	N/A	2,7
2	2AHFU6NL	KfW	<i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem</i>	2014 - 2019	8,5
3	2L21V4QA	UNDP	<i>Capacity Development for Implementing Rio Conventions through Enhancing Incentive Mechanisms for Sustainable Wathershed/Land Management</i>	2016 - 2020	1,9
4	25AWBGKA	ADB	<i>FIP I: Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation</i>	7 Desember 2016 s/d 2021	17,0
5	72829501	UNDP	<i>HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) for Compliance with the 2013 and 2015 Control Targets for Annex - C, Group-I Substances (HCFCs) in Indonesia</i>	2013 - 2018	8,1
6	73921901	Bank Dunia	<i>HCFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector Project</i>	2013 - 2018	2,7
7	71671901	Bank Dunia	<i>REDD+ Readiness Preparation Activities (TF 099721)-FCPF</i>	2011 s/d 30 November 2019	6,4
8	22PS3RQA dan 2SN87DLA	Bank Dunia dan DANIDA	<i>Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project (Proyek FIP II)</i>	2016 - 2021	13,2
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1	TF 094792	Bank Dunia	<i>Support for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communitas Project - Pamsimas</i>	11 September 2009 s/d 30 September 2017	62,7
2	TF 0A2519	Bank Dunia	<i>Replication and Mainstreaming of REKOMPAK (CSRRP)</i>	20 Mei 2016 s/d 31 Desember 2017	1,6
3	62031 INJ 149	The Government of Australia	<i>Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase 2</i>	01 Juli 2012 s/d 30 Juni 2020	71,7
4	66387 INJ 149	The Government of Australia	<i>Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIG)</i>	01 Juli 2012 s/d 30 Juni 2020	30,2

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
5	73657101	SECO	<i>Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management (Accompanying Measures)</i>	02 Mei 2013 s/d 30 Juni 2018	8,5
6	2H1GNLLA	KfW	<i>Feasibility Study for the Project Emission Reduction in Cities – Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia</i>	07 November 2016 s/d 30 Juni 2018	3,2
7	2VPZQG7A	KfW	<i>Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung</i>	07 November 2016 s/d 31 Desember 2017	0,9
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)					
1	0379-INO (EF)	ADB	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI)</i>	24 Februari 2014 s/d 30 Juni 2019	0,7
2	TF 015470	Bank Dunia	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI)</i>	05 Juni 2014 s/d 30 Juni 2019	0,8
HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA					
Badan Nasional Penanggulangan Bencana					
1	2Y4K5C2A	JICA	Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Aceh	N/A	0,1
2	2J8FJD6A	AHA Centre	Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Aceh	N/A	0,3
3	2TC71JW8	IMDFF-DR	Program Pemulihan Pasca Letusan Gunung Kelud (<i>Support to Mount Kelud Post Eruption Recovery Programme</i>)	01 November 2014 s/d Maret 2017	0,6
4	27T1K91A	<i>World Food Programme</i>	Program Penguatan Kapasitas Lembaga Penanggulangan Bencana Nasional untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Logistik	N/A	0,2
5	235RE7RA	<i>Japan Radio Company</i>	Sistem Peringatan Dini Penanggulangan Banjir	N/A	0,4
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
1	7352701	JICA	<i>Indonesia-Japan Project for Development of REDD+ Implementation Mechanism</i>	N/A	3,8
2	71733301	JICS	<i>Forest Preservation Programme</i>	N/A	9,0
3	74557101	ITTO	<i>Promoting Biodiversity Conservation in Betung Kerihun National Park (BKNP) as the Transboundary Ecosystem between Indonesia and the State of Malaysia</i>	Oktober 2013 s/d September 2017	0,9
4	74992601	ADB	<i>Technical Assistance 8331-INO: Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo</i>	2014 - 2017	4,5
5	73703301	UNDP	<i>National Biodiversity Planning to Support to Implementation of the CBD 2011-2020 Strategic Plan in Indonesia (NBSAP)</i>	2011 - 2020	0,5

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
6	2U7UNKZA	Asean Centre For Biodiversity (ACB)	Small Grats Programme in Indonesia	N/A	1,1
7	2LE3HAQA	KIFC, Korea	Rumpin Seed Nursery Center	N/A	0,3
8	23JZ8B2Z	IITO	Strengthening the Governance of Community Forest through Improved Capacity to Adequately Perform Timber Administration in Java and Nusa Tenggara Region	N/A	0,5
9	22VM682Z	DFID	Multistakeholder Forestry Program III	April 2014 s/d April 2017	10,0
10	2QK994PA	KOICA	Indonesia - Korea Wood Biomass Development Model	N/A	4,1
11	2XF9BP94	ADB	Persiapan FIP I: Community Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation	N/A	0,5
12	2MVYND1A	FAO	Strengthening Forest Management Unit for Sustainable Forest Management and Community Empowerment	2016 - 2018	0,3
13	73517101	Uni Eropa	Support to Indonesia Climate Change Response	28 Desember 2012 s/d Desember 2017	7,3
14	74977101	UNDP	Third National Communication (TNC) to The United National Convention on Climate Change	N/A	4,6
15	71373301	UNDP/Norway	Support to The Establishment of REDD+ Infrastructure and Capacity - Transition Phase	N/A	12,8
16	70997101	KOICA	Korea – Indonesia Joint Project for Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry through A/R CDM and REDD in Indonesia (KIPCCF)	N/A	2,7
17	70728801	Australia	Global Initiative on Forest and Climate Assistance to Indonesia (Indonesia Australia Forest Carbon Partnership-IAFCP)	N/A	67,0
18	2ZQS4WHY	ICRAF	Development of Timber and Non-Timber Forest Products' Production and Marketing Strategies for Improvement of Smallholders' Livelihoods in Indonesia	N/A	0,2
19	2DJHLL74	KFS	Facilitating the Participatory Planning of CFM Using Geographic Information System and Remote Sensing Technologies in Forest Resources Management in The Philippines, Indonesia and Thailand	2015 - 2019	0,5
20	2HMRPTAA	KFS	Capacity Building on the Application of Landscape Approach to Support the Sustainable Natural Resources Management in Brunei Darussalam, Indonesia, Philippines and Singapore	N/A	0,1

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
21	29J4AF5A	FAO	<i>Promoting Forest Landscape Restoration (FLR) in Selected Southeast Asian Countries</i>	September 2016 s/d Oktober 2017	0,1
22	73281901	KFS Korea	<i>A Joint Cooperation Strengthening the Capacity of the Forest management Unit Including Preparation REDD+ Implementation at Tasik Besar Serkap</i>	N/A	3,0
23	2JCK3X5Q	Danida, Kingdom of Denmark	<i>Environment Suport Project 3</i>	2012 - 2018	6,9
24	2ZF5QENA	PEMSEA	<i>Scaling Up of the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia in Indonesia</i>	November 2015 s/d November 2019	0,8
25	74753301	UNIDO	<i>Enabling Activities to Review and Update the National Implementation Plan (NIP) for the Stockholm Pollutant (POPs) in Indonesia</i>	N/A	0,2
26	2WX87RR6	UNIDO	<i>Introduction of an Environmentally Sound Management and Disposal System for PCBs Wastes and PCB Contaminated Equipment</i>	2014 - 2018	6,0
27	74819501	UNIDO	<i>Demonstration of BAT and BEP in Fossil Fuel-Fired Utilities and Industrial Boilers in Response to the Stockholm Convention on POPs</i>	N/A	0,7
28	71695701	JICA	<i>3R Waste Management Project</i>	2013 - 2015	3,4
29	27JA4E6A	JICA	<i>The Cooperation Activities on Development of Environmental Management in Collaboration with Local Government in Indonesia</i>	2016 - 2018	2,5
30	2YFYABG4	GIZ	<i>Biodiversity and Climate Change (Bioclimate)</i>	N/A	3,8
31	73008801	EU-Delegati on to Indonesia	<i>EU-Swifth Asia program SCP</i>	N/A	2,0
32	73007101	SECO	<i>Resources Efficient and Cleaner Production (RECP) Program in Indonesia</i>	2013 - 2018	4,2
HIBAH LANGSUNG UANG					
Kementerian Desa PDTT					
1	Grant IFAD 1053-ID	IFAD	Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kementerian Desa PDTT	17 Maret 2009 s/d 31 Desember 2018	0,4
2	73951901	PSF - Bank Dunia	PNPM Support Facility Trust Fund (PSF) - PNPM-Generasi	25 Juni 2013 – 31 Desember 2017	121,8
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
1	2YXH5JQA	UNDP	<i>Transforming Effectiveness of Biodiversity in Priority Sumatran Landscape</i>	2016 - 2021	9,2
2	29RCNBWZ	ITTO	<i>Development of Ramin Conservation Concept (Gonystylus spp) for Plantation Forest Concessions</i>	N/A	0,1

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
3	71435701	UNEP	<i>Implementation of The National Biosafety Framework of Indonesia (GEF)</i>	N/A	0,8
4	2HKGZXVQ	UNDP	<i>Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (E-PASS)</i>	2015 - 2020	6,5
5	2VFNWMGA	Sumitomo co., Ltd	Hibah langsung kas dari Sumitomo Forestry Co., Ltd untuk Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	N/A	20,0
6	2F4VZ97F	ITTO	<i>Improving Forest Functions in Bengkulu Province through Community Participation in Rehabilitation Degraded Forest by Using Local Prospective Commodities</i>	Juni 2015 s/d Juni 2018	0,3
7	70975701	UNDP	<i>Institutional Strengthening Phase 9-10</i>	2014 - 2018	0,3
8	73530301	UNDP	<i>Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities in Nusa Tenggara Timur (SPRAC)</i>	N/A	5,1
9	2SP7WT7L	ITTO	<i>Promoting Conservation of Selected High-value Indigenous Species of Sumatra</i>	Agustus 2014 s/d Agustus 2017	0,5
10	70891901	Komatsu	<i>Follow up Research on Rehabilitation of Degraded Forest and Land</i>	2015 - 2018	0,1
11	74125701	ITTO	<i>Model Capacity Building for Efficient and Sustainable Utilization of Bamboo Resources in Indonesia</i>	N/A	0,4
12	73841901	ACIAR	<i>Enhancing Smallholder Benefits from Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia</i>	30 April 2013 s/d 30 April 2017	0,2
13	2P6TNL64	ITTO	<i>Strengthening the Capacity of Local Institution to Sustainably Manage Community Forestry in Sanggau for Improving Livelihood</i>	N/A	0,5
14	2E88L14B	Adelaide University	<i>Implementing a DNA Timber Tracking System in Indonesia</i>	2015 - 2017	0,2
15	2CZNJQ4A	ITTO	<i>Initiating the Conservation of Cempaka Tree Species (Elmerilla spp.) through Plantation Development with Local Community Participation in North Sulawesi Indonesia</i>	Februari 2016 s/d Februari 2019	0,4
16	2UG82TZA	ACIAR	<i>Management Strategies for Acacia Plantation Diseases in Indonesia and Vietnam</i>	2016 - 2019	0,4
17	2Q34PEFA	ACIAR	<i>Enhancing Community Based Commercial Forestry in Indonesia - FOERDIA Bogor</i>	2016 - 2020	0,2
18	2R38Q9XA	ACIAR	<i>Enhancing Community Based Commercial Forestry in Indonesia - FOERDIA Makassar</i>	2016 - 2020	0,1

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Kementerian Kesehatan					
1	2UFNLPSA	Union	Memperkuat Kebijakan Pengendalian Dampak Produk Tembakau di Tingkat Nasional dan Sub Nasional (<i>Project-Indonesia-R12-11C</i>)	01 Oktober 2016 s/d 30 September 2018	0,2
2	70920201	Bank Dunia	<i>Support for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communitites Project - Pamsimas</i>	11 Sepetember 2009 s/d 30 September 2017	9.090,0
3	70913301	GAVI	GAVI (<i>Global Alliance for Vaccine and Immunization</i>) <i>New Vaccine Support</i>	N/A	17,1
4	2TT8F7KA	UNICEF	<i>Country Programme Action Plan 2016-2020</i>	Januari 2016 s/d 31 Desember 2020	0,7
5	71791901	<i>Netherlands Leprosy Relief</i>	<i>Netherlands Leprosy Relief</i>	27 November 2014 s/d 27 November 2017	0,2
6	2W4KQU4A	<i>Global Fund</i>	<i>Indonesia HIV Response: Accelerating the Achievment of the Three Zeros (1)</i>	01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017	20,1
7	2E6AZTKA	GF ATM Komponen AIDS	<i>Indonesia HIV Response: Accelerating the Achievment of Three Zeros (2)</i>	01 Januari 2016 – 31 Desember 2017	35,6
8	2JCADNZA	UNFPA	Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 9 (2016-2020)	29 Maret 2016 – 31 Desember 2020	0,9
9	71229501	WHO	<i>Implementation of MoH RI - WHO Collaborative Programmers (1)</i>	N/A	0,2
10	28D4S7SA	UNICEF	Dana Bantuan (Hibah) UNICEF	01 Januari 2016 – 31 Desember 2020	1,1
11		WHO	<i>Implementation of MoH RI - WHO Collaborative Programmers (3)</i>	N/A	0,2
12	71097101	<i>Global Fund</i> ATM	<i>Intensified Malaria Control Program in Kalimantan, Sulawesi, Sumatera and Six Provinces of Eastern Indonesia</i>	01 Januari 2016 – 31 Desember 2017	16,9
13	71240201	<i>Bloomberg Union</i>	Union	N/A	0,3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian					
1	TF OA2261	Bank Dunia	<i>Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Phase 3</i>	04 Mei 2016 s/d 31 Desember 2017	0,4
Kementerian Pertanian					
1	72818801	ACIAR / Australia	<i>Increasing Productivity of Allium and Solanaceous Vegetable Crops in Indonesia and Sub-tropical Australia</i>	01 April 2012 – 31 Maret 2015 (diperpanjang s/d 30 Desember 2016, dan diperpanjang kembali s/d 31 Mei 2017)	0,1

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
2	N/A	FAO	<i>Reducing Disaster Risks Caused by Changing Climate in Nusa Tenggara Timur (NTT) and Nusa Tenggara Barat (NTB) Provinces in Indonesia</i>	01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017	3,1
3	23BK96AL	JAIF	<i>Capacity Enhancement in Rice Production in Southeast Asia under Organic Agriculture Farming System</i>	April 2015 s/d April 2017	0,7
4	2NQF4TMA	OCP.SA-Morocco	<i>Improving Soil Fertility and Crop Production through Direct Application of Reactive Phosphate Rock</i>	Januari 2017 s/d 31 Desember 2018	0,2
5	2YYMH8ZA	ACIAR	<i>Improving Milk Supply, Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia</i>	13 Juni 2016 s/d 31 Mei 2020	0,1
6	2881RS8E	ACIAR	<i>Integrating Herbaceous Forage Legumes Into Crop and Livestock Systems in East Nusa Tenggara, Indonesia</i>	01 Mei 2014 s/d 30 April 2018	0,2
7	2E3ZD2QP	ACIAR	<i>Improving Market Integration for High Value Fruit and Vegetable Production System in Indonesia</i>	01 Maret 2014 s/d 28 Februari 2018	0,4
8	2W8R7VVG	ACIAR	<i>Improving Soil and Water Management and Crop Productivity of Dryland Agriculture Systems of Aceh and NSW</i>	01 Mei 2014 s/d 28 Februari 2018	0,1
9	2AH9JM5A	Research Council of Norway	<i>Biochar as an Adaptation Strategy for Climate Change</i>	19 September 2015 s/d 31 Desember 2017	0,1
10	2CXGC7SA	FAO	<i>Building Policy Capacity Towards Sustainable Livestock Sector Development</i>	Oktober 2014 s/d September 2016	0,1
11	2CDWXCUA	ICRAF	<i>Development of Climate - Smart Agroforestry Models on Degraded Land in East Kalimantan and Central Java</i>	14 Desember 2015 s/d 30 Juni 2017	0,1
12	2KCWV5A	FAO	<i>Multicountry Construction of a Test Platform for the Development and Allocation of Globally Unique Identifiers for Rice Germplasm, Linking the MLS Information Infrastructure and the DivSeek</i>	21 Juni 2016 s/d 21 Juni 2019	0,4
13	233T6GKA	FAO	<i>Analysis and Mapping of Impacts under Climate Change for Adaptation and Food Security through South-South Cooperation (AMICAF-SSC)</i>	05 Juni 2019 s/d 29 Desember 2017	0,1
14	29Q1X59A	FAO	<i>Co-Development and Transfer on Rice Technologies</i>	21 Juni 2016 s/d 21 Juni 2019	0,4

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	2XZS961A	Nanyang Environment and Water Institute (NTU Singapore)	Project Improving the Quality of Life in Giriharja Tofu Production Community through Biogas Production from Tofu Wastewater	01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017	0,1
TOTAL					9.764,3

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Badan Informasi Geospasial						57,4	56,4	1,1	0,0	0,0	0,0
1	IP-544	JICA	National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project	26/07/2007	26/07/2017	57,4	56,4	1,1	0,0	0,0	0,0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan						57,8	41,7	16,1	44,8	2,8	6,3
<u>Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan</u>											
2	2927-INO	ADB	Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)	19/02/2013	30/06/2018	57,8	41,7	16,1	44,8	2,8	6,3
Badan Pengusahaan Batam						46,8	10,5	36,4	21,1	8,1	38,2
3	INA-20	Korea	Development of Sewerage System in Batam Island Project	29/12/2014	29/06/2019	46,8	10,5	36,4	21,1	8,1	38,2
Badan Pusat Statistik						47,0	12,3	34,7	7,7	8,5	110,1
4	8038-ID	Bank Dunia	Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)	18/07/2011	30/11/2018	47,0	12,3	34,7	7,7	8,5	110,1
Kementerian Agama						123,8	0,8	123,0	14,8	0,7	4,7
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam</u>											
5	IND-0164	IDB	The Support to Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)	18/05/2013	10/11/2018	123,8	0,8	123,0	14,8	0,7	4,7
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						518,1	345,6	172,5	6,5	0,2	3,4
<u>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u>											
6	8217-ID	Bank Dunia	Village Innovation Project	22/03/2013	31/12/2018	450,0	289,0	161,0	0,1	0,0	0,0
7	755-ID	IFAD	Village Development Programme	17/03/2009	31/03/2018	68,1	56,6	11,5	6,4	0,2	3,4

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
Kementerian Kelautan dan Perikanan						156,9	69,0	88,0	26,5	0,5	1,9
<u>Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</u>											
8	8336-ID	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	05/06/2014	30/06/2019	47,4	8,5	38,9	9,9	0,5	5,1
	3094-INO	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	24/02/2014	30/06/2019	45,5	11,2	34,4	13,3	0,0	0,0
9	880-ID	IFAD	Coastal Community Development Project (CCDP)	23/10/2012	30/06/2018	34,0	20,9	13,1	1,6	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</u>											
10	CID 1025 01 C	Perancis (AFD)	Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)	18/06/2012	30/06/2017	30,0	28,4	1,6	1,6	0,0	0,0
Kementerian Ketenagakerjaan						32,5	5,0	27,5	24,1	1,8	7,5
<u>Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktifitas</u>											
11	IND-0159,0160	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23/12/2013	23/12/2017	32,5	5,0	27,5	24,1	1,8	7,5
Kementerian Komunikasi dan Informatika						53,6	51,6	2,0	4,1	2,5	60,1
<u>Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika</u>											
12	21686401	Perancis	Improvement on TV Transmitting Stations (ITTS) - Phase II	31/12/2014	15/12/2018	53,6	51,6	2,0	4,1	2,5	60,1
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						4.631,2	2.109,4	2.521,9	595,5	173,2	29,1
<u>Sekretariat Jenderal</u>											
13	3455-INO	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project (ESP)	21/12/2016	31/12/2019	148,2	0,0	148,2	0,9	0,0	0,0
<u>Direktorat Jenderal Bina Marga</u>											
14	IP-545	JICA	Aceh Reconstruction Project	29/03/2007	26/07/2017	104,5	77,8	26,7	0,0	0,7	0,0
15	INA-17	Korea	Padang By-Pass Capacity Expansion Project	14/04/2011	14/08/2017	58,8	30,7	28,2	5,7	3,3	57,3
16	2817-INO	ADB	Regional Road Development Project (RRDP)	31/07/2012	31/07/2018	180,0	101,2	78,8	18,8	18,7	99,4

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
	IND-0161	IDB	Regional Road Development Project (RRDP)	29/04/2013	10/06/2019	65,0	18,1	46,9	12,5	4,6	36,8
17	IP-529	JICA	Tanjung Priok Access Road Construction Project I	28/07/2005	30/12/2017	237,0	142,5	94,6	7,6	0,0	0,0
18	201542 TTL 38	RR Tiongkok	Toll Road Development of Balikpapan Samarinda	30/09/2016	30/09/2021	53,4	2,0	51,4	7,8	0,0	0,0
19	21662601	RR Tiongkok	Toll Road Development of CISUMDAWU Phase I	12/11/2012	28/08/2017	93,0	82,4	10,6	15,8	7,7	48,4
20	2016 1 TTL 389	RR Tiongkok	Toll Road Development of CISUMDAWU Phase II	30/09/2016	30/09/2022	219,4	14,1	205,3	37,9	10,2	26,9
21	2016 7 TTL 395	RR Tiongkok	Toll Road Development of Manado-Bitung	30/09/2016	30/09/2022	78,1	5,4	72,7	9,9	1,3	13,4
22	21663301	RR Tiongkok	Toll Road Development of Medan - Kualanamu	11/03/2013	11/03/2018	122,4	58,5	63,9	30,7	9,1	29,7
23	201539 TTL 38	RR Tiongkok	Toll Road Development of Solo Kertosono I	30/09/2016	30/09/2021	198,8	11,7	187,1	45,6	0,0	0,0
24	8043-ID	Bank Dunia	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)	12/03/2012	31/12/2017	250,0	119,1	130,9	34,2	6,6	19,3
<i>Direktorat Jenderal Cipta Karya</i>											
25	8259-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	02/08/2013	31/12/2017	99,9	81,1	18,8	3,7	0,0	0,0
26	8578-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS III)	22/08/2016	31/12/2020	300,0	19,1	280,9	50,2	11,0	22,0
27	2010 66 471	Jerman (KfW)	Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management	02/05/2013	30/06/2018	83,8	2,3	81,5	13,8	0,0	0,0
28	2654-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	22/11/2010	31/12/2019	35,0	23,2	11,8	2,1	1,2	57,7
29	IP-565	JICA	Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta	23/06/2014	23/06/2021	17,7	0,0	17,7	12,0	0,0	0,0
30	3123-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	80,0	0,0	80,0	10,8	0,0	0,0
	8280-INO	AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
31	8213-ID	Bank Dunia	National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2012-2015	01/03/2013	30/09/2017	266,0	256,1	9,9	18,3	8,8	48,1
	IND-0174	IDB	National Slum Upgrading Project	18/09/2016	04/05/2021	8,0	0,2	7,8	0,2	0,2	100,0
32	IND-0175	IDB	National Slum Upgrading Project	18/09/2016	09/05/2021	311,8	32,1	279,7	32,1	32,1	100,0
	IND-0176	IDB	National Slum Upgrading Project	18/09/2016	-	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
33	3122-INO	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	17/07/2014	30/06/2018	74,4	38,2	36,2	36,9	4,3	11,7
	IND-0169	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	187,0	170,5	16,5	13,0	0,0	0,0
34	IND-0170	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	8,0	6,1	1,9	1,3	0,0	0,0
	IND-0171	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	10,0	8,3	1,7	1,3	0,0	0,0
35	IP-564	JICA	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)	23/06/2014	23/06/2019	90,4	86,1	4,3	0,1	0,1	98,5
36	IND-0167	IDB	SANIMAS Comunity-Based Satnitiation Project In Indonesia	29/10/2014	29/10/2019	100,0	38,3	61,7	21,4	22,5	105,0
<u>Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</u>											
37	21595701-31	RR Tiongkok	Additional Loan for Jatigede Dam	03/09/2013	09/01/2017	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	INA-19	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	14/02/2012	22/03/2019	97,6	29,4	68,2	21,3	3,9	18,5
39	IP-552	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I	28/07/2009	28/07/2018	54,6	45,5	9,1	11,2	7,9	70,6
40	IP-567	JICA	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II	23/06/2014	23/06/2021	44,6	3,0	41,6	4,7	0,4	9,0
41	7669-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	08/06/2009	30/06/2017	50,0	45,7	4,3	3,0	0,3	11,2
42	3440-INO	ADB	Flood Management in Selected River Basin	09/12/2016	31/12/2022	108,7	0,0	108,7	16,3	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
43	8121-ID	Bank Dunia	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	18/08/2012	28/02/2019	139,6	73,6	66,0	12,7	1,4	11,2
44	IP-522	JICA	Lower Solo River Improvement Project II	28/07/2005	30/09/2017	84,2	74,4	9,8	4,3	1,9	43,4
45	IP-546	JICA	Participatory Irrigation System Improvement Project	25/07/2008	25/10/2017	110,9	108,9	2,0	2,4	0,9	37,4
46	IP-559	JICA	Upper Citarum Basin Flood Management	25/07/2013	25/07/2020	29,8	5,3	24,6	10,6	2,5	23,9
47	IP-551	JICA	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28/07/2009	28/12/2018	67,5	50,5	17,0	5,5	0,6	10,4
48	IP-566	JICA	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	23/06/2014	26/06/2021	46,1	25,8	20,2	15,7	9,5	60,7
49	8027-ID	Bank Dunia	Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP II)	14/11/2011	31/12/2018	150,0	105,2	44,8	43,2	1,5	3,5
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						21,2	21,2	0,0	1,4	1,4	100,0
<i>Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah</i>											
50	2007 66 071	Jerman (KfW)	Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training	15/12/2011	30/06/2017	21,2	21,2	0,0	1,4	1,4	100,0
Kementerian Perhubungan						760,9	132,4	628,4	137,1	1,1	0,8
<i>Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</i>											
51	IND-0133	IDB	The Development of Belawan Port Project Phase I	01/05/2010	05/04/2018	87,6	11,9	75,7	20,9	1,1	5,3
<i>Direktorat Jenderal Perkeretaapian</i>											
52	21671901	Perancis (NATIXIS)	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	30/06/2018	89,3	0,0	89,3	6,5	0,0	0,0
	CID 1029 01G	AFD	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	31/03/2018	51,7	0,0	51,7	3,7	0,0	0,0
53	IP-563	JICA	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I	23/06/2014	20/06/2021	147,1	0,0	147,1	0,3	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
54	168	RR Tiongkok	Procurement of Track Material and Turnout Phase I	24/01/2017	24/01/2020	175,1	0,0	175,1	27,3	0,0	0,0
55	IP-508	JICA	Railway Electrification and D.D.Tracking Project I	13/12/2001	11/09/2017	210,2	120,5	89,6	78,5	0,0	0,0
Kementerian Pertanian						129,1	88,9	40,2	32,5	4,5	13,9
<u>Badan Ketahanan Pangan</u>											
56	835-ID	IFAD	Smallholder Livelihood of Development In Eastern Indonesia (SOLID)	06/07/2011	31/07/2019	49,1	40,9	8,2	16,7	1,0	6,0
<u>Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</u>											
57	8188-ID	Bank Dunia	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D)	25/10/2012	30/06/2019	80,0	47,9	32,1	15,8	3,5	22,3
Kementerian PPN/Bappenas						176,4	116,4	60,0	22,0	5,5	24,9
<u>Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana</u>											
58	IP-568	Jepang (JICA)	Profesional Human Resources Development IV	23/06/2014	23/06/2023	63,7	20,8	43,0	10,9	3,3	30,1
<u>Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas</u>											
59	8010-ID	Bank Dunia	Scholarships Program for Strengthening Reforming Institution (SPIRIT)	16/06/2011	31/12/2017	112,7	95,7	17,0	11,1	2,2	19,7
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi						949,9	349,7	600,2	153,8	29,5	19,2
<u>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</u>											
60	IP-553	JICA	Development of Bandung Institute of Technology III	28/07/2009	28/07/2018	51,0	28,5	22,5	1,9	0,0	0,0
61	IP-549	JICA	Development of World Class University at University of Indonesia	25/07/2008	15/07/2018	131,9	79,1	52,8	7,8	4,4	56,2
62	IP-541	JICA	Hasanuddin University Engineering Faculty Development	26/07/2007	26/07/2019	70,3	58,7	11,6	2,9	1,5	52,3
63	2928-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project	07/02/2013	30/06/2018	75,0	33,6	41,4	9,6	0,6	6,3

(Ekuivalen dalam Juta USD)


No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
64	IND-0177	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06/11/2016	09/06/2021	13,9	0,2	13,7	1,4	0,2	14,0
	IND-0178	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06/11/2016	-	162,6	0,0	162,6	0,2	0,0	0,0
65	IND-0137	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	30/06/2017	31,3	19,7	11,6	6,2	6,1	97,7
	IND-0138	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	30/06/2017	32,7	29,3	3,4	4,4	2,5	56,8
	SFD/8/526	Saudi Fund	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	28/11/2010	31/08/2017	36,0	22,7	13,3	4,5	0,0	0,0
66	IND-0140	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24/07/2011	30/09/2017	26,8	21,5	5,3	2,9	0,0	0,0
67	IND-0155	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	30/09/2017	24,6	18,3	6,3	6,3	4,1	65,1
	IND-0156	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	30/09/2017	4,9	1,7	3,2	4,6	1,6	35,2
68	IND-0168	IDB	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	14/04/2014	28/10/2018	174,0	1,5	172,5	72,3	0,5	0,7
	SFD/9/612	Saudi Fund	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	15/09/2014	31/12/2018	35,0	2,5	32,5	11,0	2,5	22,7
<u>Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</u>											
69	8245-ID	Bank Dunia	Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)	12/06/2013	31/12/2020	80,0	32,4	47,6	18,0	5,6	30,8
Kepolisian Republik Indonesia						70,3	12,2	58,1	15,4	4,1	26,6
70	INA-21	Korea	Fast Patrol Boats for Indonesian National Police	15/07/2014	21/01/2018	32,8	11,7	21,1	13,6	4,1	30,3
71	INA-18	Korea	Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police	14/02/2012	22/11/2018	37,5	0,4	37,0	1,8	0,0	0,0
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						16,4	16,2	0,2	4,3	3,7	85,3
72	LA 15.04.2011	Spanyol	Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production	20/10/2011	30/06/2017	16,4	16,2	0,2	4,3	3,7	85,3

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)						4,6	2,7	1,9	0,9	0,0	0,0
73	8192-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)	12/06/2013	31/03/2018	4,6	2,7	1,9	0,9	0,0	0,0
PT. PERTAMINA						418,0	162,4	255,6	66,5	4,7	7,0
74	8082-ID	Bank Dunia	Geothermal Clean Energy Investment Project	29/06/2012	31/12/2018	175,0	122,4	52,6	32,9	4,1	12,5
75	IP-557	Jepang (JICA)	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25/10/2011	25/10/2019	243,0	40,0	203,0	33,6	0,6	1,7
PT. PLN						2.821,8	772,7	2.049,1	338,9	136,9	40,4
76	IP-532	JICA	Asahan Hydroelectric Power Plant III	26/06/2008	26/06/2017	249,1	10,0	239,1	1,1	0,3	32,5
77	IP-555	JICA	Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection	31/03/2010	31/03/2019	35,0	13,9	21,1	1,1	0,7	65,6
78	7940-ID	Bank Dunia	Indonesia Power Transmission Development Project (PTD I)	30/05/2011	30/06/2018	205,0	110,9	94,1	0,0	3,8	0,0
79	IP-561	JICA	Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)	23/10/2013	23/10/2022	15,6	2,7	12,9	2,4	1,5	63,9
80	3083-INO	ADB	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	224,0	8,9	215,1	35,9	7,0	19,5
	8276-INO	AIF	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	25,0	1,0	24,0	3,9	0,8	20,5
81	IP-556	JICA	Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project	26/03/2013	30/04/2022	333,3	15,4	317,9	19,3	0,0	0,0
82	IP-539	JICA	North-West Sumatera Inter-Connector Transmission	29/01/2009	29/01/2017	145,2	90,5	54,8	2,5	2,4	96,6
83	EXIM PBC 330	RR Tiongkok	Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant	03/06/2015	03/06/2020	373,0	58,9	314,1	81,4	39,2	48,1
84	21661901	RR Tiongkok	Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project	02/05/2013	02/05/2018	132,2	81,5	50,7	24,2	14,8	61,0
85	IP-538	JICA	Peusangan Hydroelectric PP Construction Project	29/01/2009	29/01/2019	234,4	126,8	107,6	56,3	6,7	12,0
86	IP-537	JICA	PLN Operation Improvement System for Supporting Generation Facilities	29/01/2009	29/01/2018	40,5	2,6	38,0	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan II TA 2017	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2017		
									Target	Realisasi	%
	26180	KfW	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 3)	05/12/2014	30/09/2017	17,4	0,0	17,4	13,6	0,0	0,0
87	CID 1039 01H	AFD	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 7)	25/07/2014	30/06/2018	20,0	1,1	18,9	7,3	1,1	14,8
	28221000	JBIC	Scattered Transmission & Subst. Project (P. 8)	19/11/2012	30/07/2018	17,1	0,7	16,4	9,1	0,7	7,7
88	8280-ID	Bank Dunia	Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)	26/03/2014	31/12/2018	325,0	28,7	296,3	0,0	6,9	0,0
89	CID 1024 01B	AFD	Strengthening West Kalimantan Power Grid	08/02/2013	30/06/2018	49,5	38,9	10,6	4,5	0,0	0,0
	3015-INO	ADB	West Kalimantan Power Grid Strengthening Project	04/04/2014	30/06/2018	49,5	28,7	20,8	0,9	0,1	9,4
90	EXIM PBC 329	RR Tiongkok	Takalar Coal Fired Steam Power Plant	29/04/2015	29/04/2020	241,0	118,1	122,9	47,5	50,1	105,4
91	IP-560	JICA	Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)	23/10/2013	23/10/2022	46,0	1,3	44,7	27,9	0,0	0,0
92	8057-ID	Bank Dunia	Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW)	01/05/2012	31/12/2018	44,0	32,3	11,7	0,0	0,7	0,0
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)						100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
93	7731-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF)	25/04/2011	31/03/2017	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta						1.111,6	438,3	673,3	320,1	52,2	16,3
94	IP-554	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	28/07/2009	28/07/2019	433,8	381,8	52,0	56,8	14,2	25,0
95	IP-571	JICA	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II	31/03/2016	31/03/2022	677,7	56,4	621,3	263,3	37,9	14,4
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)						3.784,5	2.721,6	1.062,8	882,8	171,1	19,4
Total						16.089,8	7.636,8	8.453,0	2.720,9	612,9	22,5



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id